KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344
e-mail: info@uin-antasari.ac.idwebsite: www.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL UJI PLAGIASI

Nomor : B- 815 /Un.14/I.3/KP.07.6/04/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd
NIP	: 196512141992032002
Pangkat/Gol	: Pembina / IV a
Jabatan	: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan/ Ketua Pelaksana Evaluasi Karya Ilmiah UIN Antasari Banjarmasin.

Telah memeriksa uji plagiasi dengan menggunakan www.turnitin.com kepada :

Nama	: Dr. Riinawati, M.Pd
NIP	: 198605032019032010
Pangkat/Gol	: Penata TK.I / III d
Jabatan	: Lektor
Karya Ilmiah	: Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan
Hasil Uji Plagiasi	: 19%
Rekomendasi	: Baik dengan Hasil 19%

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 6 April 2023
Yang memeriksa

Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344
e-mail: info@uin-antasari.ac.idwebsite: www.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL UJI KEMIRIPAN

No: 116/Un.14/IV/TV-CP/04/2023

Anggota Tim Verifikasi dan Validasi Karya Ilmiah Dosen UIN Antasari di bawah ini,

Nama Verifikator	: Moh. Iqbal Assyauqi, M. Pd
Jabatan	: Anggota Tim

telah melaksanakan uji kemiripan terhadap karya ilmiah yang berjudul "Manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan", karya:

Nama	: Dr. Riinawati, M. Pd
NIP	: 198605032019032010
Pangkat/Gol	: III d
Jabatan	: Penata

Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan menggunakan www.turnitin.com kemiripan karya di atas adalah 19 % (sembilan belas persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 1 April 2023
Koordinator Tim,

Muhammad Iqbal, S. Th.I., MSI., Ph. D
NIP 197709062008011011

3. Buku Referensi 2022 - Manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.pdf

by

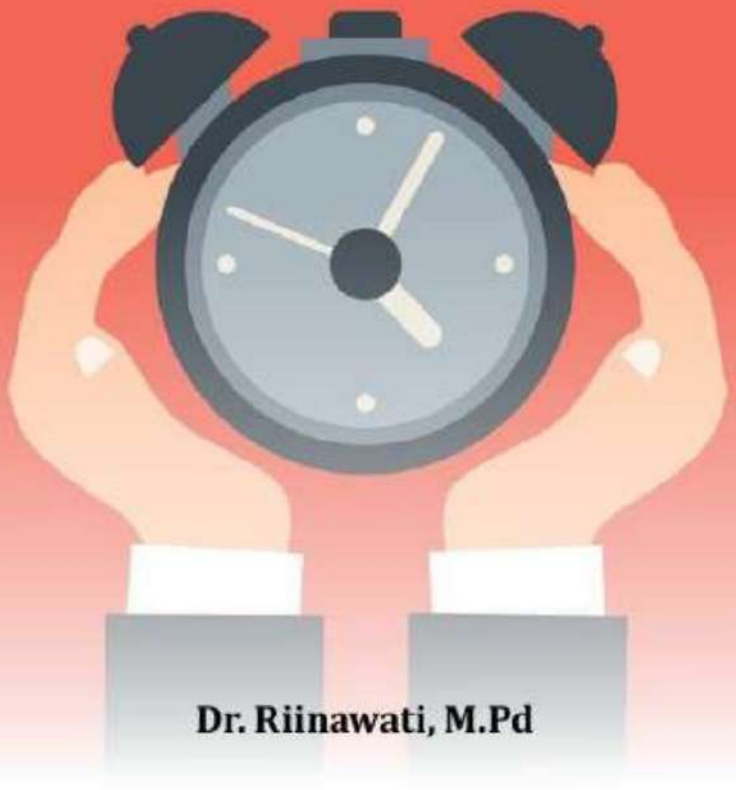
Submission date: 04-Apr-2023 12:21PM (UTC+0700)

Submission ID: 2055381246

File name: 3. Buku Referensi 2022 - Manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.pdf (1.09M)

Word count: 22103

Character count: 153992



Dr. Riinawati, M.Pd

MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN

PUBLISHER

MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN

Dr. Riinawati, M.Pd

PUBLISHER

MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN

ISBN: 978-623-99159-7-1

Penulis:
Dr. Riinawati, M.Pd.

Editor
Muhammad Noor Ilmi

Desain dan Layout
Tim Penerbit EL Publisher

Penerbit
EL PUBLISHER

Redaksi
Jl. A. Yani KM. 18 Kota Citra Graha Cluster Falmboyan Blok G No. 33 Landasan Ulin Barat, Liang Anggang, Kalimantan Selatan.

Whatsapp: 085377799989
Email : cv.elpublisher@gmail.com
Laman : www.elpublisher.com

Cetakan Pertama, 2022
Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis penerbit

.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, dengan Asma Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, dengan mengucapkan dan menuliskan ayat pertama surah Al-Fatihah ini, saya awali penulisan buku ini.

Aalhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji bagi Allah, dengan menyebut dan menuliskan ayat kedua surah Al-Fatihah ini, saya bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia iman, islam, ihsan, akhlaqul karimah, kesehatan, dan kesempatan kepada saya. Teriring do'a, agar limpahan dan karunia Allah SWT selalu mengalir pada diri kita semua termasuk saya dan keluarga saya. Allahumma aamiin.

Buku referensi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Buku ini juga bertujuan untuk memberi sedikit pencerahan bagi pembaca dan pemerhati penelitian pendidikan.

Akhir kata, semoga buku ini bermakna bagi perkembangan penelitian pada umumnya, dan penelitian pendidikan pada khususnya. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca dan pemerhati penelitian pendidikan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Metode Penelitian 8
BAB 2 Konsep Dasar Manajemen Pembiayaan Pendidikan 9
A. Pengertian Manajemen 9
B. Pengertian Pembiayaan Pendidikan 14
C. Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan 16
D. Prinsip Manajemen Pembiayaan Pendidikan 47
E. Jenis Pembiayaan Pendidikan 50
F. Komponen Pembiayaan Pendidikan 56
G. Karakteristik Pembiayaan Pendidikan 57
BAB 3 RUANG LINGKUP MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 61
A. Penyusunan Anggaran (Budgeting) 61
B. Pembukuan (Accounting) 69
C. Pemeriksaan (Auditing) 70
BAB 4 MANAJEMEN BIAYA PENDIDIKAN 71
A. Pengertian Manajemen Pendidikan 71
B. Proses Manajemen Pendidikan 75
C. Pengelolaan Biaya 78
D. Proses Manajemen Keuangan Sekolah 85
E. Kedudukan Biaya dalam Manajemen Keuangan Sekolah 89
BAB 5 DISTRIBUSI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN 91
A. Pengertian Distribusi 91
B. Biaya Pendidikan 93
C. Sumber Biaya Pendidikan 101

D. Komponen Biaya Pendidikan 105
E. Efisiensi Pembiayaan 111
BAB 6 PRODUKTIVITAS DAN EFISIENSI SISTEM KEPENDIDIKAN 115
A. Tujuan Pengukuran Produktivitas 115
B. Manfaat Pengukuran Produktivitas 118
C. Model Sistem Sosial untuk Sekolah 119
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas dan Efisiensi Sistem Kependidikan 146
BAB 7 151
KESIMPULAN 151
DAFTAR PUSTAKA 152
BIOGRAFI PENULIS 157

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak diberlakukannya 8 Standart Nasional Pendidikan yang meliputi, standar pengelolaan, standar isi, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar pembiayaan, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian, yang diberlakukan pemerintah, maka setiap sekolah atau madrasah harus berbenah memenuhi delapan standar tersebut, agar dapat eksis dan diakui keberadaannya.

Dari delapan standar tersebut bagi MI standar pembiayaanlah yang merupakan tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dikarenakan, komunitas peserta didik didominasi dari keluarga kurang dan tidak mampu, harus memperoleh pendidikan layak dengan pelayanan terbaik. Belum lagi banyak program unggulan madrasah yang memerlukan pembiayaan besar dan pengelolaan yang serius dan benar. Program tersebut untuk

menunjang keberlangsungan dan ketertarikan siswa dalam belajar agar kelak mereka mempunyai bekal dan keterampilan hidup yang cukup dan cakap. Tidak jarang sekolah atau madrasah lain memungut biaya besar dari peserta didiknya untuk menunjang pelaksanaan program sekolah/madrasah, sehingga terkadang peserta didik merasa tidak nyaman yang akhirnya terganggu dalam proses pembelajaran, padahal prestasi dan kemampuan mereka tidak jauh berbeda.

Terwujudnya peserta didik yang sholeh berdasarkan ilmu, iman, dan taqwa yang diimbangi dengan penganggaran (budgeting), pelaksanaan (actuating), dan evaluasi (controlling) pembiayaan pendidikan yang optimal, bahwa dengan manajemen pembiayaan yang benar akan dapat memberikan pelayanan mutu pendidikan dengan sebaik-baiknya meskipun dengan biaya yang terbatas agar misi madrasah dapat terealisasi dengan baik dan maksimal. Desain pengelolaan manajemen pembiayaan pendidikan yang baik akan menghasilkan output (keluaran) yang berkualitas, bermutu, berprestasi, dan menjadi idola masyarakat.

Perlu diakui bahwa pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia yang akan memberikan sumbangan terhadap pembangunan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap, dan

produktifitas. Jika pendidikan ditempatkan pada posisi upaya untuk mencerdaskan bangsa dalam konteks madani, maka diperlukan keberanian investasi yang besar untuk sistem pendidikan nasional. Sementara itu, pendidikan nasional di hadapkan pada masalah antara lain peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia dan belum terpenuhinya sumber daya dari masyarakat secara profesional sesuai dengan prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Pendidikan sebagai instrumen fundamental bagi peradaban manusia memiliki sistem yang kompleks dan terencana serta terprogram dengan pembiayaan dan penyelenggaraannya. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara rakyat dan pemerintah serta masyarakat untuk mencetak sumber daya manusia yang terdidik guna tercapainya kemajuan pada suatu pemerintahan.

Pemerintah dalam menjalankan perannya dengan masyarakat dan swasta tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya dalam pemerataan dan mutu pendidikan. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk tercapainya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan, agar kelak bangsa ini menjadi bangsa yang kokoh dan berjaya.

Hakikat sebuah pendidikan adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas peradaban manusia, oleh karena itu setiap proses pendidikan akan berusaha mengembangkan seluas-luasnya potensi individu sebagai sebuah elemen penting untuk mengembangkan dan mengubah pola pikir peserta didik sehingga kelak mereka menjadi generasi yang tangguh dan berbudi. Untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut tentunya harus diatur dengan manajemen pengelolaan yang baik serta terencana.

Pembiayaan pendidikan memang sangat mahal dengan asumsi jika diinginkan sebuah madrasah yang berkualitas maka harus didukung dengan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan profesionalisme, dana operasional yang cukup dan kenyamanan bagi kegiatan pembelajaran peserta didik dan fasilitas yang lengkap, hal ini akan terwujud apabila ditunjang dengan anggaran yang memadai, sehingga dapat menopang proses pembelajaran yang maksimal dengan harapan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Untuk melaksanakannya diperlukan ketegasan dan komitmen yang tinggi dari elit politik dan pemangku kebijakan pendidikan agar mampu menjadi pengelola bagi kemajuan pendidikan di daerahnya dengan mengembangkan berbagai

potensi yang ada. Kebijakan pendidikan di Indonesia dihitung dari hasil yang akan tercapai secara sistematis dalam jangka waktu yang panjang yaitu tatanan masyarakat yang didukung oleh mekanisme untuk mendorong kemandirian daerah. Prioritas program pendidikan dilakukan bagaimana daerah memperlihatkan prioritas pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pembangunan pendidikan dibiayai dengan pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua siswa dan masyarakat, dengan estimasi jumlah pendapatan penerimaan negara yang diperlukan pemerintah untuk membiayai rencana belanja pengeluaran pemerintah untuk satu periode tertentu. Semakin berkembangnya strategi dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan cukup memberikan pengaruh positif terhadap mutu dan keselarasan pendidikan.

Dengan adanya anggaran pendidikan yang memadai sebuah lembaga pendidikan dapat menyusun alokasi dana yang dibutuhkan untuk menopang seluruh kegiatan sehingga sesuai dengan target yang diharapkan.

Pada era sekarang ini mengelola sebuah sekolah/madrasah memerlukan inovasi dan pemikiran yang berwawasan jauh ke depan agar dapat berkembang, dengan

memertimbangkan standar pengelolaan pendidikan untuk meraih kemajuan dan peningkatan di berbagai aspek, baik akademis, prestasi nonakademis dan kemampuan manajerial dalam menyusun, perencanaan pembiayaan, pengorganisasian, aktualisasi/ pelaksanaan, dan pengawasan yang pada akhirnya sebuah lembaga akan mempunyai daya saing tinggi dan dicintai masyarakat oleh karenanya diperlukan pengelola lembaga pendidikan yang visioner yang mampu menjawab tantangan zaman.

Salah satu permasalahan mendasar pada manajemen pembiayaan pendidikan adalah bagaimana sebuah lembaga mampu merencanakan, mengorganisasikan, mengaktualisasikan, dan mengawasi pembiayaan pendidikan agar sekolah/ madrasah dapat berjalan sesuai sistem dan menghasilkan lulusan yang mempunyai daya saing dan cakap. Biaya pendidikan merupakan komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam menyiapkan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan di madrasah/ sekolah.

Disadari bahwa anggaran pembiayaan bukan merupakan satu-satunya faktor penentu agar pendidikan lebih berkualitas, namun tanpa pembiayaan yang cukup akan sulit

mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas yang dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.

Kesadaran yang dibangun pemerintah akan pentingnya pendidikan yang berkualitas pada era global modern yang serba teknologi canggih, telah diwujudkan pemerintah melalui peningkatan biaya operasional siswa, pemberian kartu pintar dan beasiswa agar pemerataan pendidikan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Oleh karenanya pemerintah secara terus menerus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Hal ini untuk memerjelas tentang pendidikan gratis di jenjang pendidikan dasar yang bermutu yang dicanangkan pemerintah agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahpahaman. Biaya pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi berhasilnya penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan biaya yang memadai.

Ditinjau dari sisi ekonomi tidak ada kegiatan pendidikan yang tidak memerlukan biaya, terlebih jika dikaitkan dengan kualitas proses dan hasil pendidikan. Semakin tinggi tuntutan kualitas semakin tinggi pula pembiayaan yang dibutuhkan. Biaya diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan proses pendidikan. Proses pendidikan

memerlukan pembiayaan oleh karenanya diperlukan penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang tepat dalam penganggaran pembiayaan pendidikan agar proses kegiatan sekolah/madrasah berjalan sesuai yang diprogramkan, guna meningkatkan mutu layanan pendidikan madrasah maka diperlukan upaya perbaikan manajemen.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna merupakan hal yang esensial dalam penelitian kualitatif.

Dari hasil perolehan data, maka hasil penelitian dianalisis secara tepat agar simpulan yang diperoleh juga tepat. Dengan pengamatan terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali Analisis data yang digunakandalam penelitian ini berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data.

BAB 2

Konsep Dasar Manajemen Pembiayaan Pendidikan

A. Pengertian Manajemen

Pengertian Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen adalah suatu ilmu juga seni untuk membuat orang lain mau dan bersedia berkerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama oleh sebab itu manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Pada hakekatnya kegiatan manusia pada umumnya adalah mengatur (managing) untuk mengatur disini diperlukan suatu seni, bagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.

Pengertian Manajemen adalah suatu rangkaian proses yg meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian dalam

rangka memberdayakan seluruh sumber daya organisasi/ perusahaan, baik sumberdaya manusia (human resource capital), modal (financial capital), material (land, natural resources or raw materials), maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi/ perusahaan.

Adanya kebutuhan Negara untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya terhadap rakyat, yakni mengatur persoalan hidup rakyat dan memberikan pelayanan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini tidak berarti bahwa manajemen belum dikenal sebelumnya, atau perkembangan manajemen terkait dengan perkembangan masyarakat Amerika dan Eropa. Kelahiran dan perkembangan manajemen bisa dikembalikan pada awal proses penciptaan alam ini. Jika kita menilik peradaban Mesir Klasik, terdapat bukti sejarah berupa piramida dan spinx yang mencerminkan adanya praktik manajeman, skill, dan kompetensi.

Manajemen selalu dipakai dan sangat penting untuk mengatur semua kegiatan dalam rumah tangga, sekolah, koperasi, yayasan- yayasan, pemerintahan dan lain sebagainya.

Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni. Mengapa disebut demikian, Sebab antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Manajemen sebagai suatu ilmu pengetahuan, karena telah dipelajari sejak lama, dan telah diorganisasikan

menjadi suatu teori. Hal ini dikarenakan didalamnya menjelaskan tentang gejala-gejala manajemen, gejala- gejala ini lalu diteliti dengan menggunakan metode ilmiah yang dirumuskan dalam bentuk prinsip-prinsip yang diwujudkan dalam bentuk suatu teori. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni, disini memandang bahwa di dalam mencapai suatu tujuan diperlukan kerja sama dengan orang lain, nah bagaimana cara memerintahkan kepada orang lain agar orang lain agar mau bekerja sama. Pada hakekatnya kegiatan manusia pada umumnya adalah mengatur (managing) untuk mengatur disini diperlukan suatu seni, bagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.

Secara etimologis diantaranya istilah manajemen berasal dari bahasa latin manus yang berarti "tangan", dalam bahasa italia maneggiare berarti "mengendalikan, dalam bahasa inggris istilah manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Sedangkan secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya:

1) Schein memberi definisi manajemen sebagai profesi. Menurutnya manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, karakteristiknya adalah para profesional membuat keputusan berdsarkan

prinsip-prinsip umum, para profesional mendapatkan status mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat.

2) Terry memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pebgarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksudmaksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.
3) Luther Gulick mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama- sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

Manajemen dibutuhkan dibutuhkan oleh individu atau kelompok individu, organisasi bisnis, organisasi sosial atau pun organisasi pemerintah untuk mengatur, merencanakan segala hal untuk memperoleh hasil yang optimal pada waktu yang

akan datang.10 Manajemen dibutuhkan oleh semua orang, karena tanpa manajemen yang baik, segala usaha yang dilakukan kurang berhasil. Dalam perkembangannya proses manajemen adalah langkah langkah strategis yang juga adalah manfaat dari manajemen tersebut. Untuk mencapai tujuan organisasi, oleh karena itu manjer perlu menjaga keseimbangan yang berbeda yaitu tuntutan stakeholders dan tuntutan pekerja.

Tiap-tiap organisasi tentunya memiliki satu atau sebagian tujuan yang memastikan arah serta menjadikan satu pandangan unsur manajemen yang ada dalam organisasi itu. Sudah tentunya tujuan yang mau diraih nantinya yaitu satu kondisi yang tambah baik daripada kondisi diawalnya. Dalam perkembangannya manajemen digunakan untuk mengendalikan organisasi.

Organisasi dapat diartikan sebagai suatu kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam organisasi dirasakan perlunya bekerja sama atau bantuan orang lain. Keberhasilan suatu organisasi antara lain ditentukan oleh kemampuan pemimpin/manajer untuk mengatur kerja sama tersebut. Kegiatan memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, mengembangkan

kegiatan organisasi merupakan kegiatan organisasi merupakan kegiatan manajemen.

B. Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan merupakan suatu konsep yang seharusnya ada dan tidak dapat dipahami tanpa mengkaji konsep-konsep yang mendasarinya. Pembiayaan pendidikan tidak lepas dari persoalan ekonomi pendidikan. Johns dan Morphet (1983) mengemukakan bahwa "pendidikan itu mempunyai peranan vital terhadap ekonomi dan negara modem".

Secara urnum pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas, yang didalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga yang makro (nasional), yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaanya, akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya lembaga pendidikan, dan permasalahan- pennasalahan yang masih terkait dengan pembiayaan pendidikan, sehingga diperlukan studi khusus untuk lebih spesifk mengenal pembiayaan pendidikan ini.

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung dapat menunjang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Sementara menurut Supriyono dalam Dinda (2019), biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Secara bahasa, biaya dapat diartikan sebagai pengeluaran, dalam istilah ekonomi biaya pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Menurut Levin dalam Dinda, pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan lembaga pendidikan di berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.

Biaya pendidikan, menurut Supriyadi (2003), merupakan salah satu komponen instrumental (instrumental-input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang

luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga.

Menurut Nanang Fattah (2009) biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya baik berupa uang, tenaga atau barang yang secara langsung dapat menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan.

C. Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Produktivitas suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor manajemen pembiayaan. Manajemen merupakan komponen utama dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa manajemen tidak melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional, melainkan mengatur tindakan pelaksanaan

dengan membentuk sistem. Sistem adalah,"Suatu jaringan kerja atau network yang terdiri dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain yang tergabung bersama-sama (untuk membentuk suatu kegiatan atau untuk mencapai sasaran spesifik". (Khairuddin, 2008).

Sedangkan manajemen menurut Manullang (1997:48) adalah, "Seni dan ilmu pengetahuan, penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber daya, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu". Sedangkan menurut Moenir (1998:22) berpendapat: "Manajemen pada hakekatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi."

Ada definisi lain tentang manajemen yang dikemukakan oleh Siagian (1996:66) bahwa "Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang melalui orang-orang lain."

Dari definisi-definisi tersebut di atas, dapat dimengerti bahwa manajemen merupakan suatu proses pencapaian tujuan tertentu melalui kerjasama dengan sekelompok orang, dengan pembagian tugas yang jelas serta menggunakan alat-alat tertentu pula untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

dalam perencanaan. Dalam perencanaan suatu kegiatan tidak mungkin dikerjakan sendiri-sendiri, tetapi dituntut harus dapat bekerjasama serta adanya unsur-unsur manajemen seperti: manusia, uang, material, mesin, metode, dan sebagaimana yang diperlukan dalam menggerakkan kegiatan organisasi.

Di kalangan para ahli belum terdapat suatu kesepakatan mengenai jumlah fungsi- fungsi manajemen. Kesepakatan yang telah dicapai yaitu pada dasarnya keseluruhan fungsi-fungsi manajemen itu dapat dibagi ke dalam dua klasifikasi utama yaitu:

1. Fungsi organisasi, merupakan fungsi yang mutlak harus dijalankan oleh manajemen, ketidakmampuan menjalankan fungsi tersebut akan mengakibatkan lamban atau matinya organisasi.
2. Fungsi pelengkap, meskipun tidak mutlak harus dijalankan oleh organisasi, namun sebaiknya dilaksanakan karena pelaksanaan fungsi dengan baik akan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. (Siagian, 1996:68)

Terry dalam Sukarno (2002:32) membagi fungsi-fungsi manajemen terdiri dari: “Planning (Perencanaan), Organizing, (Pengorganisasian), Actuating (Penggerakan) dan Controlling (Pengendalian/Pengawasan)." Sedangkan Gullick dalam

Siagian (1996:68) mengemujakan bahwa: "Fungsi-fungsi manajemen terdiri atas Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Motivating (Penggerakan), Controlling (Pengawasan) dan Decision Making (Pengambilan Keputusan).

Dari teori-teori yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan betapa besar peranan manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi. Apabila semua fungsi manajemen dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka pencapaian tujuan organisasi akan terlaksana dengan efektif dan efisien.

Optimalisasi fungsi-fungsi manajemen dapat diterapkan dalam setiap aspek pembiayaan untuk mendukung kegiatan, karena biaya merupakan salah satu unsur yang berpengaruh dalam suatu kegiatan. Semua kegiatan yang memberikan output yang berkualitas tidak luput dari adanya ketersediaan biaya. Begitu pula dengan pendidikan, dimana pendidikan yang merrupakan salah satu bentuk investasi sangat berpengaruh terhadap ketersediaan biaya.

Abdullah (1998:162) mengatakan bahwa secara teoritis, "Biaya adalah nilai besar dana yang perlu disediakan pada proyek kegiatan tertentu". Biaya dalam kaitan ini adalah sesuatu yang harus dikeluarkan dalam mencapai keuntungan. Konsep biaya tidak selalu identik dengan uang.

Pengertian biaya dalam ekonomi adalah pengorbanan-pengorbanan yang dinyatakan dalam bentuk uang, diberikan secara rasional, melekat pada proses produksi, dan tidak dapat dihindarkan. Bila tidak demikian, maka pengeluaran tersebut dikategorikan sebagai pemborosan. (Abdullah, 2008:31).

Menurut Purwanto (2002:12), "Biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan yang diberikan untuk setiap kegiatan dalam rangka mencapai suatu tujuan." Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis merumuskan bahwa biaya adalah segala sesuatu yang dikeluarkan dalam bentuk sumber daya, untuk mendapatkan pengembalian berupa uang atau layanan dalam rangka pencapaian tujuan dari kegiatan tertentu.

Menurut Harmanto dan Zulkifli (2003:24), bahwa:

> Biaya adalah sebagai berikut: Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkui pembagian kepada penanam modal.
>
> Biaya dalam dalam arti luas, biaya (cost) adalah jumlah uang yang dinyatakan dan sumber-sumber (ekonomi) yang dikorbankan terjadi dan akan terjadi untuk rnendapatkan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu.

> Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu, sehingga biaya dalam arti luas diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva.

Dari uraian di atas dapat dianalisa bahwa biaya merupakan suatu dampak yang diterima oleh seseorang atau kelompok, baik dari aspek keuangan atau sumber daya lain setelah yang bersangkutan melaksanakan kegiatan atau diberikan layanan.

Dalam hal penggunaan sumber daya keuangan, biaya (cost) tidak sama dengan anggaran (budget). Apabila biaya merupakan segala bentuk pengeluaran akibat dari suatu kegiatan, maka anggaran cenderung pada sisi penerimaan dan pengeluarannya. Fattah (2004:47) mengatakan bahwa, "Anggaran adalah rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu."

Dari pengertian di atas dapat digambarkan bahwa anggaran adalah input yang diperoleh oleh suatu satuan kerja atau organisasi untuk membiayai kegiatan. Berkaitan dengan

investasi, pendidikan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam manajemen pendidikan, biaya pendidikan dipisah dalam tiga kategori., yaitu: biaya operasional, biaya pengembangan staf dan biaya investasi. (Alma, 1997:28). Biaya operasional yakni biaya pendidikan yang digunakan untuk menunjang kelancaran operasional pembelajaran. Pembiayaan dalam kelompok inilah yang saat ini diberikan pemerintah pusat melalui DBO (Dana Bantuan Operasional). Biaya pengembangan staf yakni pembiayaan pendidikan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan sekolah mencapai mutu layanan yang optimal. Termasuk pembiayaan dalam kelompok ini adalah biaya untuk membantu guru-guru mengikuti berbagai seminar dan workshop yang terkait langsung dengan kemampuan profesional guru, membantu guru dalam meningkatkan kualifikasi akademiknya lewat beasiswa studi ke S2 dan sejenisnya. Selanjutnya, biaya investasi yakni pembiayaan pendidikan yang diagendakan sebagai investasi masa depan sekolah. Termasuk dalam kelompok pembiayaan ini adalah pembangunan gedung, laboratorium sekolah, jaringan internet untuk pembelajaran, penyediaan sarana prasarana perpustakaan dan sejenisnya yang semua itu bermakna sebagai investasi keunggulan sekolah di masa depan.

Alokasi pembiayaan pendidikan harus mengacu kepada tujuan yang ingin dicapai dari sistem pendidikan yang dilaksanakannya. Kegiatan pendidikan merupakan salah satu unsur dalam pencapaian tujuan negara Indonesia dalam melahirkan sumber daya manusia

yang berkualitas sebagai salah satu modal pembangunan. Dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan salah satu tujuan dari negara Indonesia adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa".

Upaya yang dilakukan oleh negara dalam mencerdaskan kehidupan adalah menyelenggarakan pendidikan, dimulai dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai ke perguruan tinggi. Dengan penyelenggaran pendidikan diharapkan akan tumbuh tunas-tunas bangsa yang berkualitas yang mampu bersaing secara sehat di arena persaingan yang semakin global. Apalagi dalam menghadapi perdagangan bebas beberapa tahun mendatang.

Pendidikan suatu negara akan maju bila dikelola dengan baik, sistematis dan terencana. Dalam pengelolaan pendidikan yang baik, peranan manajemen pendidikan tidak dapat diabaikan. Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau lembaga yang mempunyai tujuan akhir yaitu menambah wawasan, ilmu,

maupun pengetahuan yang lebih dari sebelum mereka memperoleh pendidikan tersebut.

Sebagaimana disebutkan oleh Purbopranoto (1999:136) pendidikan adalah:

> Suatu proses atau usaha setiap bangsa yang tak putus-putus sifatnya didalam segala tingkat kehidupan manusia, yang sesuai perkembangan masyarakat dan kebudayaan, dan bertujuan untuk mencapai kesempurnaan atau kedewasaan pada manusia, agar kesadaran dan tanggung djawab dapat menghadapi berbagai persoalan hidup.

Dari pengertian tersebut di atas menunjukkan bahwa kemajuan bangsa sangat tergantung pada tingkat pendidikan masyarakatnya. Untuk menjawab tantangan dalam pembangunan pendidikan sangat diperlukan partisipasi oleh semua pihak. Dengan pendidikan dapat mempercepat proses pembangunan di segala bidang, dengan mengembangkan pola berfikir, bekerja, bertindak, sikap mental dan pandangan hidup masyarakat. Untuk mendapatkan pendidikan tidak harus melalui pendidikan formal di sekolah akan tetapi juga dapat dicapai melalui pendidikan non formal.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyebutkan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan dan pengajaran dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Rumusan ini jelas menyatakan bahwa usaha pendidikan harus dilakukan secara jelas dan bukan sesuatu yang dapat dilaksanakan tanpa rencana. Usaha pendidikan yang dilakukan secara jelas menunjukkan bahwa harus mempunyai tujuan yang jelas.

Sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam aline keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dalam Pasal 31 ayat 1 Undang- Undang Dasar menetapkan, "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran".

Untuk maksud tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah sebagaimana dikemukakan oleh Becker (1998:10) bahwa, "Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang

diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan, sedangkan jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, termasuk keluarga."

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan yang efektif dalam membentuk watak generasi muda, tidak hanya di sekolah saja, tetapi harus pula diperhatikan pendidikan luar sekolah, khususnya pendidikan di lingkungan keluarga. Sebab tanpa pendidikan di lingkungan keluarga yang baik sukar diperoleh mutu bangsa yang memadai.

Pendidikan dan kehidupan masyarakat saling mempengaruhi. Pendidikan dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, antara lain, keadaan sosial ekonomi; factor kesenjangan sosial ekonomi akan mempengaruhi strategi dalam perencanaan pendidikan. Pendidikan mempengaruhi kehidupan masyarakat, dengan memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, pendidikan akal, budi pekerti dan kerohanian kepada anak didik atau generasi muda secara langsung maupun tidak langsung akan menentukan jenis pekerjaan dan penghidupan di kemudian hari, profesinya akan menempatkan seseorang pada tingkat sosial ekonomi tertentu

dan mepengaruhi perkembangan generasi seterusnya. (Abdullah, 2008:34)

Kegiatan pendidikan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan tidak berdiri sendiri, oleh karena itu perencanaan pendidikan perlu mengetahui aspek-aspek sosial dan ekonomi yang mempunyai hubungan dan peranan dalam pertumbuhan dan perubahan pendidilkan. Perencanaan regional perlu mempertimbangkan aspek sosiologis seperti kebiasaan, adat istiadat dan kebudayaan serta nilai-nilai budaya masyarakat setempat dan aspek-aspek ekonomi seperti tingkat pendapatan, pola konsumsi, kebiasaan menabung dan sebagainya.

Setiap kebijakan yang dituangkan dalam rencana pendidikan yang dilaksanakan akan mempengaruhi kehidupan sosial dan tingkah laku kelompok masyarakat, oleh karena itu dalam perencanaan pendidikan harus memperhatikan aspek-aspek sosiologis yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan, di antaranya:

1. Bagaimana aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, di mana pendidikan dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki mutu kehidupan;

2. Bagaimana mendapatkan pendidikan yang mudah dan murah sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat;
3. Bagaimana mempersiapkan fasilitas pendidikan dan mutu pendidikan yang baik;
4. Bagaimana menghadapi situasi dan aspirasi masyarakat yang selalu bergerak dan berkembang. (Blaug, 1998:36)

Dalam konteks pembangunan perekonomian bangsa, maka pendidikan dapat dipandang sebagai investasi karena pendidikan yang berhasil akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemajuan ekonomi mendorong perkembangan pendidikan, dan pendidikan yang maju merupakan salah satu persyaratan untuk perkembangan ekonomi selanjutnya.

Dari aspek investasi, maka biaya pendidikan sebagai segala sesuatu yang dikeluarkan dalam bentuk sumber daya, untuk mendapatkan pengembilan berupa barang atau layanan jasa dalam rangka pencapaian tujuan di bidang pendidikan. Biaya pendidikan adalah seluruh pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai proses pelaksanaan pendidikan.

Biaya pendidikan juga merupakan komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif,

biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Biaya pendidikan memiliki cakupan yang sangat luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang).

Berkenaan pengertian biaya pendidikan, Anwar (2003:10) mengatakan bahwa, "Biaya pendidikan memiliki pengertian yang luas, hampir segala pengeluaran yang bersangkutan dengan penyelenggaraan pendidikan dianggap sebagai biaya." Sehubungan dengan itu, manajemen pendidikan mengkaji, menganalisis pengeluaran, segi manfaat dan efisiensinya, sehingga pengeluaran untuk pendidikan merupakan biaya pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara bahasa biaya (cost) dapat diartikan pengeluaran, dalam istilah ekonomi, biaya/pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Biaya Pendidikan menurut Supriadi (2003:19) merupakan salah satu komponen instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan

pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan uang).

Fattah (2003:23) menyatakan bahwa biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost).

> Lebih lanjut Fromkin mengemukakan bahwa (1996:23): Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar mahasiswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji dosen yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh mahasiswa selama belajar.

Sedangkan Boediono (1992:69) menyebutkan bahwa, "Biaya pendidikan dapat dikategorikan dalam beberapa cara, antara lain biaya ini dikategorikan atas (1) biaya langsung dan biaya tidak langsung, (2) biaya sosial dan biaya privat, dan (3) biaya moneter dan biaya non-moneter.

Mengacu pada pengertian di atas, dana pendidikan sebenarnya tidak selalu identik dengan uang, melainkan juga terkait dengan segala sesuatu pengorbanan yang diberikan untuk setiap aktivitas dalam rangka mencapai tujuan

penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, dana yang dikeluarkan memiliki keterkaitan dengan mutu pendidikan yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam pembiayaan pendidikan sebagai penunjang peningkatan mutu diperlukan pengelolaan yang terencana agar tujuan dari pendidikan dapat tercapai dengan baik. Secara lebih jelas, pembiyaan pendidikan pada tingkat instansi yang membina penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pusat hingga daerah berkisar pada program rutin dan pembangunan. (Anwar:105), dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program rutin, meliputi:
    a. Belanja pegawai, yaitu gaji, tunjangan, dan belanja pegawai lainnya
    b. Belanja barang dan jasa untuk keperluan sehari-hari perkantoran, pembelian alat-alat tulis kantor, barang cetak, alat-alat rumah tangga, pengiriman surat dan barang, sewa gedung, keamanan kantor dan lain- lain.
    c. Belanja pemeliharaan, yaitu untuk pemeliharaan gedung, peralatan kantor, barang-barang inventaris dan lain-lain.
    d. Belanja perjalanan, yaitu untuk perjalanan dinas, penginapan dan lain-lain.
2. Program pembangunan (proyek), yaitu:

Pengeluaran yang berhubungan dengan biaya lembaga pendidikan untuk pembelian beberapa sumber atau input proses pembelajaran, seperti sarana dan prasarana, serta operasional kelembagaan penunjang pengembangan institusi.

Sedangkan Fattah (2004:48), memberikan penjelasan tentang anggaran rutin dan anggaran pembangunan:

> Anggaran rutin atau recufrent expenditure adalah anggaran yang ditunakan untuk membiayai pengeluaran rutin atau berulang-ulang, seperti gaji, barang yang harus sering diganti, serta kegiatan operasional yang bersifat reguler pada suatu lembaga.
>
> Anggaran pembangunan atau capital expenditure adalah pengeluaran untuk barang-barang yang tahan lama, seperti gedung sekolah, laboratorium, sarana olahraga, fasilitas belajar lainnya serta bantuan operasional kegiatan penunjang organisasi.

Biaya operasional satuan pendidikan berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

1. Gaji pendidikan dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai

3. Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lainnya. (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005).

Sedangkan jenis-jenis pembiayaan terdiri dari berdasarkan Standar Nasional Pendidikan meliputi :

1. Biaya investasi, meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
2. Biaya personal, yaitu belanja pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005)

Dalam kaitan ini, Suryadi (1999:305) menyatakan, "Rendahnya biaya pendidikan berdampak terhadap kualitas keluaran pendidikan, karena secara langsung berpengaruh terhadap kapasitas dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan".

Pembiayaan pendidikan dijalankan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah dalam pembangunan di bidang pendidikan. Menurut Rencana Strategis Departemen

Pendidikan Nasional fungsi- fungsi pembiayaan pendidikan adalah :

1. Memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin.
2. Penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan.
3. Memberikan insentif dan disinsentif bagi :
    a. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan
    b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan secara berkelanjutan.
    c. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pengelola pendidikan. (Depdiknas:2005)

Selanjutnya Fattah (2003:49) menyatakan bahwa fungsi pembiayaan dapat digolongkan kedalam tiga jenis, yaitu:

1. Sebagai alat penaksir.
2. Sebagai alat otorisasi pengeluaran dana, dan
3. Sebagai alat efisiensi

Fungsi pembiayaan pendidikan dalam kerangka desentralisasi dan otonomi pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pendidikan. Seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sektor pendidikan adalah salah satu yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Departemen Pendidikan Nasional akan terus membantu provinsi dan kabupaten/kota

dalam pembiayaan pembangunan sector pendidikan. Bersamaan dengan itu, komitmen dan kemampuan kabupaten/kota dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan terus ditingkatkan melalui pengembangan kapasitas. Bantuan pembiayaan pendidikan dan pengembangan kapasitas pada prinsipnya diarahkan untuk makin memperkuat desentralisasi dan kemandirian pemerintah daerah dalam manajemen pembiayan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan harus mampu menjadi strategi peningkatan akses, mutu dan tata kelola. Kapasitas pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam mengelola sumber-sumber daya pendidikan sangat menentukan keberhasilan program-program pengembangan pendidikan. Pembiayaan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah berdasarkan kriteria seperti tujuan yang akan dicapai dalam pemenuhan standar nasional pendidikan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan, akuntabilitas dalam pengelolaan serta manfaat yang diperoleh.

Dalam program pemihakan terhadap masyarakat miskin, pemerintah akan mulai menghilangkan hambatan biaya seluruh biaya operasional satuan pendidikan di luar gaji pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini merupakan amanat konstitusi dan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pemerintah secara bertahap akan membebaskan seluruh

beban operasional satuan pendidikan negeri dan swasta menuju pendidikan dasar bebas biaya. Walaupun orang tua siswa dibebaskan dari biaya operasional satuan pendidikan, masih banyak keluarga miskin yang itdak mampu memenuhi biaya pribadi untuk anaknya sehingga tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Untuk mengantisipasinya program penyediaan beasiswa yang disalurkan melalui biaya satuan pendidikan ke sekolah untuk menutup biaya pribadi bagi siswa yang tidak terhambat masuk sekolah. Bantuan beasiswa juga dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi sekolah.

Pendidikan merupakan upaya atau kegiatan yang dilakukan secara sadar sistematis dan berkelanjutan, dalam upaya mendewasakan manusia atau dengan kata lain mencerdaskan kehidupan bangsa. Mayoritas kegiatan tersebut berlangsung di lembaga pengajaran dari pendidikan prasekolah sampai dengan perguruan tinggi, termasuk lembaga pendidikan lainnya, baik formal, non formal dan in formal.

Dalam prosesnya pendidikan membutuhkan sejumlah biaya yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sarana dan prasarana serta kegiatan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya pendidikan sebagai

pengorbanan yang dikeluarkan untuk dapat terselenggaranya proses pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan.

Lembaga pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan, seperti halnya pada bidang usaha lainnya menghadapi masalah yang sama, yaitu biaya produksi, tetapi ada beberapa kesulitan khusus mengenai penerapan perhitungan biaya ini. Hallack (1995:33) mengemukakan tiga macam kesulitan, yaitu berkenaan dengan:

1. Definisi produksi pendidikan,
2. Identifikasi transaksi ekonomi yang berhubungan dengan pendidikan, dan
3. Suatu kenyataan bahwa pendidikan mempunyai sifat sebagai pelayanan umum.

Dalam konsep dasar pembiayaan pendidikan hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis adalah biaya satuan per peserta didik (unit cost). Biaya satuan di tingkat satuan pendidkan merupakan aggregate biaya pendidikan tingkat sekolah baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikerluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan per peserta didik merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan sekolah secara efektif

untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. Oleh karena biaya satuan ini diperoleh dengan memperhitungkan jumlah peserta didik pada masing-masing satuan pendidikan, maka ukuran biaya satuan dianggap standar dan dapat dibandingkan antara satuan pendidikan yang satu dengan yang lainnya. Analisis mengenai biaya satuan dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya dapat dilakukan dengan menggunakan satuan pendidikan sebagai unit analisis. Dengan menganalisis biaya satuan, memungkinkan kita untuk mengetahui efisiensi dalam penggunaan sumber- sumber di satuan pendidikan, keuntungan dari investasi pendidikan, dan pemerataan pengeluaran masyarakat, pemerintah untuk pendidikan. Disamping itu, juga dapat menjadi penilaian bagaimana alternatif kebijakan dalam upaya perbaikan atau peningkatan sistem pendidikan

Menurut Gaffar (2000:38) bahwa, "Unit cost yang dipergunakan adalah perstudent unrolled untuk reccurent cost place untuk capital cost. Tujuan mengitung biaya dengan menggunakan unit cost adalah untuk mengetahui financial implication pendidikan dalam mencapai tujuan dan target tertentu."

Untuk perguruan tinggi, standar ideal unit cost pendidikan adalah 18 juta per mahahasiswa. Menurut Supriadi (2005:35),"unit cost pendidikan tinggi yang ideal adalah Rp 18 juta per mahasiswa, apabila unit cost tidak memenuhi rasio ideal, maka perguruan tinggi tersebut akan sulit mengembangkan kegiatan akademik dan pelayanan pendidikan".

Namun demikian, bahwa sebagian besar perguruan tinggi belum memiliki unit cost ideal, sehingga dalam melaksakan operasional kegiatan banyak ditemui hambatan dalam proses pembelajaran maupun pelayanan pendidikannya. Dengan demikian, besarnya biaya pendidikan pada suatu satuan pendidikan berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran pada satuan pendidikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Fattah (2004:111), bahwa:

a. Terdapat hubungan yang positif dan kontribusi yang signifikan antara biaya dengan kualitas belajar mengajar.
b. Terdapat hubungan yang positif dan kontribusi yang signifikan dengan mutu hasil belajar.
c. Terdapat hubungan yang positif dan kontribusi yang signifikan antara mutu proses belajar mengajar-mengajar dengan mutu hasil belajar siswa.

Behingga sekali permasalahan muncul dalam penyelenggaraan pendidikan, salah satunya adalah keterbatasan anggaran pendidikan dan juga termasuk kelemahan dalam mengelola biaya pendidikan. Berkaitan dengan keterbatasan anggaran ini, Supriadi (2003:6) menyatakan bahwa:

> Hal penting dipertanyakan adalah apakah bangsa Indonesia sudah melakukan sesuatu yang terbaik yang dapat dilakukan dalam keadaan yang serba terbatas ini? Dalam keadaan seperti ini, kita tetap harus berusaha bagaimana caranya agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisian sesuai dengan kondisi yang ada sekarang ini.

Pendidikan merupakan suatu investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap usaha pendidikan. Sehingga untuk menjalankan operasional pendidikan diperlukan biaya-biaya. Adapun komponen biaya tersebut meliputi: Komponen biaya pendidikan yang memberikan kontribusi terhadap kualitas dan komponen untuk optimalisasi proses belajar mengajar. (Renshaw, 1998:48)

Pembiayaan pendidikan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dari pendidikan itu sendiri. Untuk itu

pembiayaan yang tepat sasaran harus diawali dengan perencanaan pendidikan yang baik. Pengertian perencanaan pendidikan adalah suatu usaha melihat ke masa depan dalam menentukan kebijakan, prioritas dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial dan politik untuk mengembangkan potensi sistem pendidikan nasional, memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh sitem tersebut. (Sedarmayanti, 1995:49).

Definisi tersebut merupakan dimensi baru dalam perencanaan pendidikan. Perbedaan dengan perencanaan klasik ialah dalam hal perhatiannya yang diberikan kepada pertumbuhan ekonomi, pengembangan sumber tenaga kerja dan terhadap perencanaan makro. Pada perencanaan klasik tidak memperhatikan hal tersebut. Perencanaan pendidikan di Indonesia merupakan suatu proses penyusunan alternatif kebijakan mengatasi masalah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan pendidikan nasional yang mempertimbangkan kenyataan-kenyataaan yang ada di bidang sosial, ekonomi, sosial, budaya dan kebutuhan pembangunan secara menyeluruh terhadap pendidikan nasional.

Perencanaan pendidikan sebagai suatu alat yang dapat membantu para pengelola pendidikan untuk menjadi lebih berdaya guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perencanaan pendidikan akan dapat menolong pencapaian suatu target atau sasaran secara lebih ekonomis, tepat waktu dan memberi peluang untuk lebih mudah dikontrol dan dimonitor dalam pelaksanaannya. Perencanaan dapat membantu pelaksanaan kegiatan agar berjalan dengan baik perlu pemahaman fungsi-fungsi manajemen yang lainnya, di antaranya kemampuan mengorganisasikan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan.

Penyelenggaraan pendidikan yang efektif tidak terlepas dari penerapan manajemen pendidikan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Tilaar (2005:15) yang menyatakan bahwa, "Pengelolaan sistem pendidikan nasional apabila tidak dikelola dengan sebaik-baiknya, maka bukan hanya tidak efektif tetapi juga tidak efisien. Dengan dana yang masih terbatas, pengelolaan pendidikan termasuk di dalamnya peningkatan fungsi manajemen harus dilaksanakan."

Pengelolaan sistem pendidikan dengan sebaik-baiknya tidak terlepas dari sistem manajemen yang baik. Disadari bahwa manajemen merupakan serangkaian proses, maka

dalam proses tersebut mencakup bagaimana proses manajemen terlibat dalam fungsi- fungsi manajemen yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam konteks manajemen stratejik tahapan manajemen temasuk manajemen pembiayaan melalui tahapan-tahapan perencanaan (terdiri dari pengamatan lingkungan dan perumusan strategi), pelaksanaan (implementasi strategi), serta evaluasi dan pengendalian. (Murniati: 2008:94). Berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, maka ada fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan antara lain: Perencanaan biaya pendidikan, pelaksanaan pembiayaan dan pengawasan (Depkeu, 2003).

Sedangkan Satori (2007:4), mengemukakan bahwa tahapan-tahapan atau urutan kerja dalam manajemen pembiayaan pendidikan terdiri dari:

1. Perencanaan biaya pendidikan
2. Penggunaan biaya pendidikan
3. Pengendalian biaya Pendidikan

Pemberdayaan fungsi-fungsi manajemen diarahkan untuk meningkatkan efekvitas pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu, maka peningkatan fungsi-fungsi manajamen dalam

pembiayaan pendidikan harus dilakukan dalam rangka mencapai lima target, yaitu:

1. Efisiensi pengadaan barang dan jasa
2. Alokasi belanja yang tepat sasaran
3. Alokasi belanja yang berkeadilan sosial.
4. Peningkatan pelayanan kualitas pelayanan
5. Citra baik lembaga pendidikan. (Alan, 2001:28).

Selanjutnya untuk mencapai kelima target manajemen pembiayaan tersebut menurut Bowen (2001:29) harus melalui mekanisme:

1. Penetapan kebijakan belanja yang ekonomis, efektif dan efisien
2. Perencanaan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan adil.
3. Pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Penyusunan dan pelaksanaannya harus realistis dan memperhatikan aspek kemampuan dalam mengelolanya, karena penetapan alokasi pembiayan pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan pembelajaran. Untuk itu, diperlukan suatu kebijakan perencanaan yang tepat dalam upaya menetapkan kebijakan belanja tepat sasaran. Salah satu strategi yang mendukung program ini adalah melalui kebijakan belanja yang research

based, dimana kebijakan ini menghendaki agar penyusunan dan pelaksanaan anggaran dilakukan berdasarkan informasi yang merupakan produk riset atau analisis yang akurat y ang dapat dipertanggungjawabkan. Fokus strategi yang mengarah pada efisiensi pengadaan barang dan jasa dimaksudkan untuk mencapai target optimalisasi pemanfaatan sumber daya keuangan. Untuk itu, penerapan skala prioritas belanja dan efektifitas penggunaan sumber daya keuangan melalui penajaman prioritas alokasi merupakan faktor penting dalam pengendalian efisieni belanja.

Untuk membuat suatu perencanaan dan alokasi biaya yang tepat dan berkeadilan dilakukan berdasarkan prioritas program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. Sehingga perencanaan dan alokasi anggaran harus diawali dengan perhitungan dasar anggaran (baseline budget) sesuai dengan kebutuhan belanja satuan pendidikan yang rasional. Untuk itu, akurasi dan komprehensitas data dan model perencanaan dan alokasi anggaran yang kredibel menjadi faktor yang turut menentukan keberhasilan perencanaan biaya. Salah satu kebijakan yang mendukung hal tersebut, misalnya: perbaikan kesejahteraaan tenaga pendidikan dan kependidikan; peningkatan efisiens belanja

barang dan jasa; peningkatan bantuan sosial yang langsung menyentuh kepentingan rakyat miskin.

Peningkatan fungsi-fungsi manajemen pembiayaan harus dilakukan dengan prinsip good governance yang meliputi penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran, penyaluran anggaran, pelaksanaan pembayaran, pengelolaan kas/uang dan pertanggungjawaban atas realiasasi anggaran, maka semua tahapan-tahapan dalam manajemen pembiayaan pendidikan harus dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan biaya pendidikan.

Pendanaan pendidikan nasional disusun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan Menteri Pendidikan Nasional, program-program pembangunan pendidikan dan sasarannya serta implementasi program pengembangannya. Pelaksanaan pembangunan pendidikan masih akan menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya, baik sarana dan prasarana, ketenagaan maupun anggaran pendidikan. Oleh karena itu, peran fungsi manajemen pembiayaan harus lebih ditingkatkan, dengan membuat strategi pembiayaan yang disusun untuk menyiasati keterbatasan sumber daya tersebut, agar pelaksanaan program pembangunan pendidikan dapat

memberikan andil yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional.

D. Prinsip Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Berikut ini adalah penjabarannya:

a) Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan

dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.

b) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen

keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah , (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat

c) Efektivitas

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai

aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

d) Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:

a) Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya, Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil- kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan.
b) Dilihat dari segi hasil, Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak- banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.

Tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi memungkinkan terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat secara memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

E. Jenis Pembiayaan Pendidikan

Beberapa jenis dan golongan biaya pendidikan yang dikaji dalam artikel ini sebagai berikut.

Pertama, biaya langsung (direct cost) diartikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Anwar dan Idochi, 1991). Biaya langsung juga diartikan sebagai biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendi- dikan. Sebagai contoh biaya untuk gaji guru dan pengadaan fasilitas belajar-mengajar (Gaffar, 1991). Biaya- biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, dan gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah, orang tua, maupun peserta didik sendiri (Fattah, 2000).

Selanjutnya, berikut ini jenis-jenis biaya-biaya yang merupakan bagian dari biaya langsung (direct cost), yaitu: 1) Biaya rutin (recurrent cost), merupakan biaya yang digunakan untuk mem- biayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Biaya ini digunakan untuk menunjang pelaksanan program pengajaran, pembayaran gaji guru, dan personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana.

Menurut Gaffar (1987) biaya rutin dihitung berdasarkan "per student enrolled". Menurutnya, biaya rutin dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu: 1) rata-rata gaji guru per tahun; 2) ratio guru, murid dan proporsi gaji guru terhadap keseluruhan biaya rutin; dan 3) biaya pem- bangunan (capital cost), merupakan biaya yang digunakan untuk pembelian tanah, pembangunan ruang kelas, perpustakaan, lapangan olah raga, konstruksi bangunan, pengadaan perlengkapan mobelair, biaya penggantian dan perbaikan. Lebih lanjut, Gaffar (1987) menyatakan bahwa biaya pembangunan dihitung atas dasar "per student place". Menurutnya, dalam menghitung biaya pembangunan ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu pertama: tempat yang menyenangkan untuk murid belajar, biaya lokasi atau tapak (site), dan biaya perabot dan peralatan. Kedua: biaya tidak langsung (indirect cost) dapat dimaknai sebagai biaya yang umumnya meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan (earning foregone by students), bebasnya beban pajak karena sifat sekolah yang tidak mencari laba (cost of tax exemption), bebasnya sewa perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan serta penyusutan sebagai cermin pemakaian perangkat sekolah yang sudah lama dipergunakan (implicit rent and depreciation)

Fattah (2000). Selanjutnya, berikut ini jenis-jenis biaya yang merupakan bagian dari biaya tidak langsung (indirect cost), yaitu: 1) biaya pribadi (private cost), adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dan termasuk di dalamnya forgone opportunities. Dalam kaitan ini, Jones (1985) mengatakan "In the context of education these include tuitions, fees and other expenses paid for by individuals". Dengan kata lain, biaya pribadi adalah biaya sekolah yang dibayar oleh keluarga atau individu; 2) biaya masyarakat (social cost), adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah (di dalamnya termasuk biaya pribadi). Dalam kaitan ini, Thomas, H. Jones (1985) mengatakan "Sometimes called public cost, the include cost of educations financed through taxation. Most public school expenses are examples of sosial costs". Dengan kata lain, biaya masyarakat adalah biaya sekolah yang dibayar oleh masyarakat.

Ketiga, monetary cost adalah semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Keempat. non monetary Cost adalah semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun dapat dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak

langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan, misalnya materi, waktu, tenaga, dan lain-lain.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 62 disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal (Depdiknas, 2005). Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengem- bangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; bahan atau peralatan habis pakai; dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Adapun biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengukuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan (Depdiknas, 2005).

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Pasal 7 sampai dengan Pasal 30), pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah yang terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu: 1) biaya investasi satuan pen- didikan,meliputi: a) biaya investasi lahan pendidikan dan b) biaya investasi selain

lahan pendidikan; 2) biaya investasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, meliputi: a) biaya investasi lahan dan b) biaya investasi selain lahan; 3) biaya operasi satuan pendidikan, meliputi: a) biaya personalia dan b) biaya non- personalia; 4) biaya operasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan,yang meliputi: a) biaya personalia dan b) biaya nonpersonalia; serta 5) bantuan biaya pendidikan dan bea- peserta didik (Depdiknas, 2008).

Dalam perkembangannya, kebutuhan pen- danaan pendidikan merupakan salah satu permasalahan yang cukup pelik untuk dikelola secara efektif dan efisien. Permasalahan penda- naan pendidikan erat kaitannya dengan ke- perluan operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan. Biaya tersebut, antara lain: 1) biaya operasional pendidik dan tenaga kependidikan (gaji dan honor/insentif/tunjangan); 2) proses pembelajaran dan penilaian; 3) pengadaan, perawatan, dan perbaikan/perawatan sarana- prasarana pendidikan; dan 4) manajemen.

Fungsi pembiayaan tidak dapat terpisahkan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Oleh karena itu, pembiayaan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan yang harus disikapi dan dicarikan berbagai alternatif solusinya. Ketidakmampuan lembaga

penyelenggara pendidikan untuk menyediakan pendanaan pendidikan akan menghambat proses operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Namun demikian, bukan jaminan manakala tersedia biaya pendidikan yang memadai akan menjamin penyelenggaraan pendidikan berhasil lebih baik. Dalam memahami permasalahan pembiayaan pendidikan di Indonesia, perlu memahami permasalahan apa saja yang timbul serta alternatif penyelesaiannya (Depdiknas, 2005).

Berdasarkan uraian klasifikasi biaya pen- didikan, maka jelaslah bahwa biaya pendidikan memiliki pengertian yang luas. Hal ini sebagaimana dipertegas oleh Anwar (1991) bahwa hampir segala pengeluaran yang bersangkutan dengan penyelenggaraan pendidikan dianggap sebagai biaya. Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan dalam melakukan klasifikasi biaya pendidikan untuk mencapai tujuan yang dituju semua pihak yaitu kesuksesan pelaksanaan pendidikan.

F. Komponen Pembiayaan Pendidikan

Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap

penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2005 membawa implikasi terhadap perlunya disusun standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Selanjutnya dinyatakan bahwa standar biaya-biaya satuan pendidikan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Standar pembiayaan pendidikan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertaman (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia.

G. Karakteristik Pembiayaan Pendidikan

Ada beberapa karakteristik penting yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan dan pembiayaan Pendidikan, di antaranya:

1. Trend pembiayaan pendidikan selalu menunjukkan kenaikan, dimana perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan unit cost yang terdiri dari:

a. Unit cost lengkap, yaitu perhitungan unit cost berdasarkan semua fasilitas yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan;
b. Unit cost setengah lengkap, hanya memperhitungkan biaya kebutuhan yang berkenaan dengan bahan dan alat yang berangsur habis walaupun jangka waktunya berbeda;
c. Unit cost sempit, yaitu unit cost yang diperoleh hanya dengan memperhitungkan biaya yang langsung berhubungan dengan memperhitungkan biaya yang lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar.

2. Pembiayaan terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor sumber daya manusia. Dimana pendidikan dapat dikatakan sebagai ―human investment‖, yang artinya biaya terbesar diserap oleh tenaga manusia, yakni pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah, semakin bermutu sekolah tersebut, kecenderungan penggunaan biaya yang besar semakin menjadi kebutuhan yang realistis dan sebaliknya semakin kecil biaya yang disediakan kecenderungan untuk tidak bermutu semakin menjadi realistis;

4. Unit cost pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Biaya untuk sekolah kejuruan lebih besar daripada biaya untuk sekolah umum;
5. Unit cost rutin komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun sehingga bisa diprediksi dan diestimasi. (Suharti, T., & Nurhayati, I.;2015).

Dengan memahami karakteristik manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan, di atas, tentu para manajer keuangan, bendahara, perencana keuangan bisa memproyeksi kebutuhan dan sumber keuangan, pendanaan, dan pembiayaan yang bisa dicarikan dari berbagai pihak yang terkait dengan proses layanan pendidikan yang diselenggarakan dapat dipenuhi kebutuhannya. Sehingga siap memberikan layanan terbaik dan mutu pendidikan yang sesuai dengan harapan segenap stakeholder pendidikan.

BAB 3

RUANG LINGKUP MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

A. Penyusunan Anggaran (Budgeting)

Untuk mencapai sasaran berbagai kegiatan dibidang pendidikan baik yang diselenggaran di sekolah maupun luar sekolah sangat tergantung kepada pembiayaan guna membiayai berbagai kegiatan tersebut.

Penegakan hukum merupakan kegiatan untuk menyerasikan hubungan antar nilai - nilai yang terjabarkan dalam sikap tindak dan kaidah-kaidah mantap sebagai suatu rangkaian penjabaran nilai tahap akhir (Wicaksono et al., 2020).

Menurut (Fattah, 2000) penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (Budget). Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dengan bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran

tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga.

Sedangkan menurut (Mac Donald & Lawton, 1977) anggaran adalah sejenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan dalam bentuk angka- angka dari segi uang untuk suatu jangka waktu tertentu.

Dari pengertian diatas, tampak bahwa penganggaran dan anggaran tidak semata- mata berkaitan dengan uang, namun juga memberi gambaran tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam anggaran kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan disertai dengan besarnya biaya atau dana yang akan digunakan, sehingga terdapat dua hal yang perlu mendapatkan perhatian besar yaitu besarnya dana untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan serta kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dapat disimpulkan bahwa anggaran pendidikan adalah rencana keuangan yang akan digunakan untuk suatu kegiatan yang telah disusun untuk jangka waktu tertentu.

Karakteristik Anggaran

Anggaran pada dasarnya terdiri dari dua sisi yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana. Biasanya dalam pembahasan

pembiayaan pendidikan, sumber-sumber biaya itu dibedakan dalam tiap golongan, pemerintah, masyarakat, orang tua dan sumber-sumber lain.

Besarnya biaya pendidikan yang bersumber dari pemerintah ditentukan berdasarkan kebijakan keuangan pemerintah ditingkat pusat dan daerah setelah mempertimbangkan skala prioritas. Besarnya penerimaan dari masyarakat baik perorangan, maupun lembaga, yayasan yang berupa uang tunai, barang, hadiah atau pinjaman bergantung pada kemampuan lembaga dan masyarakat setempat dalam memajukan pendidikan. Besarnya dana yang diterima dari orang tua berupa iuran BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan) dan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) yang langsung diterima sekolah didasarkan atas kemampuan orang tua murid dan ditentukan oleh lembaga itu sendiri. Sedangkan penerimaan dari sumber-sumber lain termasuk dalam golongan ke tiga yaitu adanya bantuan atau pinjaman dari luar negeri yang diperuntukkan bagi pendidikan.

Dalam setiap anggaran tergambar dua sisi penting yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan menunjukkan sumber-sumber dari mana dana itu diperoleh apakah dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dari orang tua, dari masyarakat, atau sumber lain yang

dibenarkan, sedangkan sisi pengeluaran menggambarkan alokasi besarnya biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai (Fattah, 2000).

Sisi pengeluaran terdiri dari alokasi besarnya biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai. Dari seluruh penerimaan, sebagian dipergunakan untuk membiayai kegiatan administrasi, ketatausahaan, sarana prasarana pendidikan, dan sebagian diberikan kepada kepala sekolah melalui beberapa saluran. Selain anggaran rutin terdapat anggaran proyek yang setiap tahun disalurkan oleh Departemen Pendidikan dengan kebutuhan sekolah-sekolah. Anggaran rutin pemerintah pusat dibiayai seluruhnya dari penerimaan pajak, sedangkan anggaran proyek dibiayai dari surplus anggaran rutin.

Dalam pembahasan pengeluaran, istilah-istilah yang digunakan adalah:

1. Recurrent Expenditure

   Yaitu pengeluaran rutin atau yang bersifat berulang tiap-tiap tahun, seperti gaji, barang yang harus sering diganti.

2. Capital Expenditure

   Yaitu pengeluaran untuk barang- barang yang tahan lama, seperti Gedung sekolah, laboratorium, sarana olahraga, dan lain sebagainya.

Fungsi Anggaran

Anggaran disamping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. Anggaran dapat dipergunakan untuk melihat apakah program kegiatan terlaksana dengan baik serta apakah penggunaan dana untuk membiayai program tersebut sesuai, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, anggaran juga dapat berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila melihat perkembangannya, anggaran mempunyai fungsi sebagai alat penaksir, sebagai alat otoritas pengeluaran dana dan sebagai alat efisiensi.

Anggaran sebagai alat efisiensi merupakan fungsi yang paling esensial dalam pengendalian. Dari segi pengendalian jumlah anggaran yang didasarkan atas angka-angka standart dibandingkan dengan reaiisasi biaya yang melebihi atau kurang, dapat dianalisis ada tidaknya pemborosan.

Prinsip-Prinsip

Anggaran harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang ada. Diantaranya adalah prinsip-prinsip adalah:

a. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi

b. Adanya sistem akutansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran.
c. Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi
d. Adanya dukungan dan pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah.

Persoalan penting dalam penyusunan anggaran adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efektif dan efisien, mengalokasikan dana secara tepat sesuai dengan skala prioritas. Itu sebabnya dalam prosedur peyusunan anggaran memerlukan tahapan-tahapan yang sistematik yaitu sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran.
b. Mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa dan barang.
c. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan finansial.
d. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu.
e. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang.
f. Melakukan revisi usulan anggaran.

g. Persetujuan revisi usulan anggaran.

h. Pengesahan anggaran.

Secara khusus, anggaran rutin pendidikan untuk penyelenggaraan sekolah dasar didasarkan atas pendataan SD yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis yang selanjutnya disajikan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian dana bantuan dari pemerintah pusat. Langkah pendataan dilakukan dengan menggunakan format pendataan yang diisi langsung oleh kepala sekolah, selanjutnya dikumpulkan oleh tim Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (SBPP) tingkat kecamatan, selanjutnya dikumpulkan di kabupaten/ kota madya dan provinsi. Ketentuan pembiayaan pendidikan perlu didasarkan atas kebutuhan biaya penyelenggaran pendidikan di setiap daerah yang didasarkan atas satuan biaya yang sama dan alokasi setiap daerah ditetapkan berdasarkan jumlah sekolah, kelas, murid dan pegawai sekolah.

Bentuk-Bentuk Anggaran Pendidikan

Anggaran mempunyai fungsi manajemen, baik dalam perencanaan maupun pengawasan. Bentuk-bentuk anggaran sangat menentukan karena tidak semua anggaran dirancang untuk melakukan fungsi manajemen. Dibawah ini akan disajikan bentuk-bentuk desain anggaran pendidikan.

a. Anggaran Butir Per Butir (Line Item Budget)

Anggran butir per butir merupakan bentuk anggaran yang paling simpel dan banyak digunakan. Dalam bentuk ini, setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan katagori-katagori. Misalnya, gaji, upah, honor menjadi satu kategori atau satu nomor dan pelengkapan, sarana, material dengan nomor yang selanjutnya.

b. Anggaran Program (Program Budget System)

Bentuk ini dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program. Pada anggaran biaya per butir di hitung berdasarkan jenis nomor yang akan dibeli, sedangkan pada anggaran program biaya dihitung berdasarkan jenis programnya. Misalnya, jika dalam anggaran butir per butir disebut gaji guru (nomor1), sedangkan dalam anggaran laporan disebut gaji untuk perencanaan pengajaran IPA hanyalah salah satu komponen, dan komponen lain yang termasuk program percobaan termasuk alat- alat IPA, bahan-bahan percobaan kimia dan sebagainya menjadi satu paket.

c. Anggaran Berdasarkan Hasil (Performance Budget)

Sesuai dengan namanya bentuk anggaran ini menekankan pada hasil bukan pada keterperincian dari suatu alokasi anggaran. Pekerjaan akhir dalam suatu program terpecah dalam bentuk beban kerja dan unit hasil yang dapat diukur.

Hasil pengukurannya digunakan dipergunakan untuk menghitung masukan dana dan tenaga yang dipergunakan untuk mencapai suatu program.

d. Sistem Perencanaan Penyusunan Program Dan Penganggaran (Planning Programing Budgeting System atau S4)

   Sistem ini merupakan kerangka kerja dalam perencanaan dengan mengorganisasikan informasi dan menganalisisnya menganalisisnya secara sistematis. Dalam sistem ini, tiap-tiap tujuan suatu program dinyatakan dengan jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam proses ini data tentang biaya, keuntungan, kelayakan suatu program disajikan secara lengkap sehngga pengambilan keputusan dapat menentukan pilihan program yang dianggap paling menguntungkan.

B. Pembukuan (Accounting)

Pengurusan ini meliputi dua hal yaitu, pertama mengurusi halyang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima ataumengeluarkan uang. Pengurusan kedua menyangkut urusan tindaklanjut dari urusan pertama yaitu, menerima, menyimpan danmengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenanganmenentukan,

tetapi hanya melaksanakan dan dikenal dengan istilah pengurusan bendaharawan. Bendaharawan adalah orang atau badanyang oleh Negara diserahi tugas menerima, menyimpan danmembayar, atau menyerahkan uang atau surat-surat berharga dan barang-barang termasuk dalam pasal 55 ICW (Indische ComptabiliteitsWet), sehingga dengan jabatan itu mereka mempunyai kewajiban atau pertanggungjawabaan apa yang menjadi urusannya kepada BadanPemeriksa Keuangan (BPK).

C. Pemeriksaan (Auditing)

Auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pert anggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Bagi unit-unit yang ada didalam departemen, mempertanggungjawabkan urusan ini kepada BPK melalui departemen masing-masing.

BAB 4

MANAJEMEN BIAYA PENDIDIKAN

A. Pengertian Manajemen Pendidikan

Manajemen berasal dari bahasa latin dari kata "manus" yang artinya "tangan" dan "agere" yang berarti " melakukan". Kata-kata ini digabung menjadi "managere" yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada (Asmendri 2012: 1). Manajemen menurut Terry (1986) adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. Menurut Harsey dan Blanchard (1988: 4) manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial. Manajemen dalam artian sempit sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan supaya dapat menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lainnya. Dari

pemikiran- pemikiran para ahli tersebut, menurut penulis manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen (Planing, Organizing, Actuating, Controling) agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efesien.

Pendidikan (education) secara semantik berasal dari bahasa yunani paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagogos adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantar anak-anak ke dan dari sekolah. Selain itu, di rumahnya anak tersebut selalu dalam pengawasan dan penjagaan para paedagogos. Istilah ini berasal dari kata paedos yang berarti anak, dan agogos yang berarti saya membimbing atau memimpin.

Menurut Langeveld (1971: 5) pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup, cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh ini datangnya dari orang dewasa (orang yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari dan sebagainya) dan ditujukan

kepada orang yang belum dewasa. Dalam perspektif keindonesiaan, pengertian, fungsi, dan tujuan pendidikan dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 dan 3 "pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasaan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara". Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Manajemen pendidikan menurut Purwanto (1970: 9) adalah semua kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha-usaha besar, seperti mengenai perumusan policy, pengarahan usaha-usaha besar, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol perlengkapan, dan seterusnya sampai kepada usaha-usaha

kecil dan sederhana, seperti menjaga sekolah dan sebagainya. Menurut Usman (2004: 8) manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Nawawi (1983: 11) mengemukakan bahwa manajemen pendidikan adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan yang merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja sama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu terutama lembaga pendidikan formal.

Dari pendapat para ahli di atas dapat penulis simpulkan bahwa Manajemen Pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien.

B. Proses Manajemen Pendidikan

Hikmat (2009: 101-135) menyatakan bahwa proses manajemen pendidikan formal (baca: sekolah) meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, budgeting, Staffing dan evaluasi. Subtansi dari masing-masing proses tersebut dapat disimak dari penjelasan berikut.

Pertama, tahap perencanaan (planning). Perencanaan pendidikan formal (baca: sekolah) adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program sekolah yang di dalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan sekolah yang dituangkan dalam visi dan misi, kebijakan-kebijakan yang dijadikan landasan kegiatan sekolah dan menentukan arah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan sekolah serta metode yang akan dijalankan dalam usaha mencapai tujuan sekolah.

Kedua, tahap pengorganisasian (organizing). Proses pengorganisasian yaitu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi sekolah dan menyatupadukan tugas serta fungsinya dalam sistem jaringan kerja relationship antara satu dan yang lainnya.

Dalam proses pengorganisasian lembaga sekolah, kepala sekolah menetapkan pembagian tugas, wewenang, dan

tanggung jawab secara rinci berdasarkan bagian dan bidang masing-masing sehingga terintegrasi hubungan-hubungan kerja yang sinergis, kooperatif, harmonis dan seirama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Ketiga, tahap pengendalian (controling). Pengendalian yaitu meneliti dan mengawasi agar semua tugas dilakukan dengan baik dan sesuai berdasarkan peraturan yang ada atau sesuai dengan deskripsi kerja masing-masing personal.

Pengendalian dapat dilakukan secara vertikal maupun horizontal, atasan dapat melakukan pengontrolan kepada bawahannya, demikian pula bawahan dapat melakukan upaya kritik kepada bawahannya. Pengendalian terdiri atas penelitian terhadap hasil kerja sesuai dengan rencana/ program kerja, pelaporan hasil kerja dan pendataan berbagai tantangan yang dihadapi serta evaluasi hasil kerja dan problem solving.

Keempat, tahap penyusunan anggaran (budgeting). Setiap lembaga membutuhkan pembiayaan tak terkecuali lembaga sekolah. Suatu anggaran merupakan rencana penggunaan sumber-sumber keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan terpadu. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus dilakukan secara matang, terencana, tepat, efektif dan efisien. Sehingga dalam penyusunan anggaran

kepala sekolah harus memperhatikan income yang diperoleh sebelum mengeluarkan dana untuk kegiatan tertentu.

Kelima, tahap staffing atau assembling resources. Staffing atau assembling resources termasuk kegiatan organisasi dalam proses manajemen yang sangat penting karena berhubungan dengan penempatan orang dalam tugas dan kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi staffing, kepala sekolah harus melakukan hal-hal berikut; menentukan jenis pekerjaan, menentukan jumlah orang yang dibutuhkan, menentukan tenaga ahli, menempatkan personal sesuai dengan keahliannya, menentukan tugas, fungsi, dan kedudukan pegawai, membatasi otoritas dan tanggung jawab pegawai, menentukan hubungan antar unit kerja, menentukan gaji, upah, dan insentif bagi pegawai serta menentukan masa jabatan, mutasi, pensiun, dan pemberhentian pegawai (berkaitan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, AD/ ART sekolah).

Keenam, evaluasi. Evaluasi artinya menilai semua kegiatan sebagai indikator sukses atau gagalnya pencapaian tujuan, sehingga dapat dijadikan bahan kajian berikutnya. Dalam mengkaji masalah yang dihadapi, rumuskan solusi alternatif yang dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan

yang ada dan meningkatkan kualitas keberhasilan di masa yang akan datang. Evaluasi sebagai fungsi manajemen merupakan aktivitas untuk meneliti dan mengetahui pelaksanaan yang telah dilakukan dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan.

C. Pengelolaan Biaya

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.

Definisi biaya menurut Supriyono biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Secara bahasa, biaya (cost) dapat diartikan sebagai pengeluaran, dalam istilah ekonomi biaya pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. (Dedi Supriadi, 2004) dalam bukunya mendefinisikan biaya sebagai semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk uang, barang, dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang).

Menurut Hasbullah Pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan. 3 Biaya dalam pengertian ini yaitu jenis pengeluaran baik dalam bentuk barang maupun tenaga untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah menitik beratkan upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Unsur biaya adalah hal yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya sangat mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan lembaga/organisasi dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut (Domai, 2010) Pembiayaan pendidikan tidak lepas dari persoalan "ekonomi pendidikan". Bahkan, secara tegas Mark Blaugh mengemukakan bahwa "the economics of education is a branch of economics". Jadi, dapat dikatakan menurut pandangan ini bahwa pada dasarnya pembiayaan pendidikan merupakan bagian atau cabang dari ilmu ekonomi. Sebab, pembiayaan pendidikan menurut Blaugh sebagai the costing and financing of school places, yaitu bagian dari permasalahan ekonomi pendidikan. Pada bagian lain Mark Blaugh mengemukakan, "the economic of education is only part of the story of any educational issue". Menurut pandangan ini mengkaji ilmu ekonomi pendidikan maupun pembiayaan

pendidikan hanya merupakan salah satu isu penting dalam dunia pendidikan.

Menurut Yahya dan Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia., 2012 yang dikutip oleh Mulyono pembiayaan adalah bagaimana mencari dana atau sumber dana dan bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja, dan merencanakan kebutuhan masa yang akan datang akan uang.

Sedangkan (Fattah, 2000) mendefinisikan biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakulikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.

Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitaas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan

efektif. Pemahaman tentang konsep pembiayaan pendidikan perlu diketahui pengertian dari tujuh konsep penting terkait dengan pembiayaan yang meliputi (1) objek biaya, (2) informasi manajemen biaya, (3) pembiayaan (financing), (4) keuangan (finance), (5) anggaran (budget), (6) biaya (cost), dan (7) pemicu biaya (cost driver).

a. Objek Biaya

   Blocher dkk. mengatakan bahwa objek biaya merupakan sesuatu alumusi biaya dari berbagai aktivitas. Menurut Blocher ada empat jenis objek biaya, yakni

   1) produk atau kelompok produk yang saling berhubungan,
   2) jasa,
   3) departemen (departemen teknis, departemen sumber daya manusia), dan
   4) proyek, seperti penelitian, promosi pemasaran, atau usaha jasa komunitas.

   Pendidikan sebagai suatu lembaga atau organisasi tidak berorientasi kepada laba, maka objek biayanya adalah jasa dengan seluruh elemen (perangkat keras dan lunak) yang melekat pada prosesnya.

b. Informasi Manajemen Biaya

Blocher dkk. mengatakan bahwa informasi manajemen biaya merupakan suatu konsep yang luas, yakni mencakup segala informasi yang dibutuhkan untuk mengelola secara efektif suatu perusahaan atau organisasi nonprofit, baik berupa informasi keuangan tentang biaya maupun informasi nonkeuangan yang ada kaitannya dengan produktivitas, kualitas, dan faktor kunci sukses lainnya untuk suatu organisasi.

c. Pembiayaan (Financing)

Pembiayaan adalah bagaimana mencari dana atau sumber dana dan bagaimana menggunakan dana itu dengan memanfaatkan rencana biaya standar, memperbesar modal kerja, dan merencanakan kebutuhan masa yang akan datang akan uang. Sementara biaya pendidikan adalah seluruh usaha yang dicurahkan oleh pemerintah dan masyarakat pendidikan berupa uang maupun non moneter, biaya memerlukan penginventarisasian yang jelas.

Financing (pembelanjaan atau pembiayaan) merupakan fungsi penyediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan usaha. Kebanyakan usaha besar atau kecil memerlukan dana untuk modal tetap seperti tanah, bangunan, mesin, gudang, modal kerja, dan modal tetap

lainnya. Dalam usaha yang besar atau kecil modal dapat terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.

d. Keuangan (Finance)

   Definisi yang sederhana tentang keuangan (finance) adalah seni untuk mendapatkan alat pembayaran.

e. Anggaran (Budget)

   instrumen yang dirancang untuk memfasilitasi perencanaan. Ensiklopedi Manajemen menggunakan budgeting sebagai perencanaan dan koordinasi dari berbagai kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu periode tertentu dengan melakukan prakiraan kebutuhan yang diperlukan dan hasil yang ingin dicapai serta pengawasan pelaksanaannya.

   Knezevich mengemukakan budgeting merupakan alat penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk biaya untuk setiap komponen kegiatan. Prosedur penganggaran dilakukan dengan (1) menyusun ramalan tentang kemungkinan pendapatan dan belanja selama periode tertentu (2) menetapkan anggaran berdasarkan ramalan, (3) statistik pelaksanaan dikumpulkan dan dibandingkan dengan dugaan- dugaan, (4) mengukur varian-varian dan menganalisis penyebab- penyebabnya, dan (5) melakukan perbaikan.

Menurut (Fattah, 2000) menjelaskan bahwa anggaran (budget) merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, di dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga.

Sebagaimana dijelaskan Yahya, faktor- faktor yang perlu dikembangkan dalam membuat anggaran adalah (1) permintaan terhadap hasil produksi dan stabilitas permintaan potensi dasar, (2) jenis-jenis hasil produksi yang dibuat, (3) jenis-jenis dan sifat hasil produksi yang dibuat, (4) kemampuan menyusun jadwal dan mengatur pelaksanaan, (5) jumlah dana yang dipergunakan dibandingkan dengan hasil yang mungkin dicapai, serta (6) perencanaan dan pengawasan.

f. Biaya (Cost)

Biaya adalah jumlah uang yang disediakan (dialokasikan) dan digunakan atau dibelanjakan untuk terlaksananya berbagai fungsi atau kegiatan guna mencapai suatu tujuan dan sasaran-sasaran dalam rangka proses manajemen. Konsep biaya secara keseluruhan berkaitan dengan setiap fungsi manajemen, yaitu (1) manajemen strategis, (2)

perencanaan dan pengambilan keputusan, (3) penentuan harga pokok jasa dan pelaporan keuangan, dan (4) pengendalian manajemen dan pengendalian operasional.

g. Pemicu Biaya (Cost Driver)

Pemicu biaya (cost driver) menurut Blocher dkk. adalah faktor yang memberi dampak pada perubahan biaya total. Artinya jumlah total biaya sangat dipengaruhi oleh cost driver sebagai faktor yang mempunyai efek terhadap perubahan level biaya total dari suatu objek biaya.

D. Proses Manajemen Keuangan Sekolah

Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananyakegiatan belajar-mengajar bersama komponen komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatanyang dilakukan sekolah memerlukan biaya. Dalam tataran pengelolaan Vincen P Costa (2000:175) memperlihatkan cara mengatur lalu lintas uang yang diterima dan dibelanjakan mulai dari kegiatanperencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan penyampaian umpanbalik. Kegiatan perencanaan menentukan untuk apa, dimana, kapan dan beberapa lama akandilaksanakan, dan bagaimana cara melaksanakannya. Kegiatan pengorganisasian menentukan bagaimana aturan dan

tata kerjanya. Kegiatan pelaksanaan menentukan siapa yang terlibat, apa yang dikerjakan, dan masing-masing bertanggung jawab dalam hal apa. Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan mengatur kriterianya, bagaimana cara melakukannya, dan akan dilakukan oleh siapa. Kegiatan umpan balik merumuskan kesimpulan dan saran-saran untuk kesinambungan terselenggarakannya Manajemen Operasional Sekolah. Muchdarsyah Sinungan menekankan pada penyusunan rencana (planning) di dalam setiap penggunaan anggaran. Langkah pertama dalam penentuan rencana pengeluaran keuangan adalah menganalisa berbagai aspek yang berhubungan erat dengan pola perencanaan anggaran, yang didasarkan pertimbangan kondisi keuangan, line of business, keadaan para nasabah/konsumen, organisasi pengelola, dan skill para pejabat pengelola. Proses pengelolaan keuangan di sekolahmeliputi:

1. Perencanaan anggaran
2. Strategi mencari sumber dana sekolah
3. Pengunaan keuangan sekolah
4. Pengawasan dan evaluasi anggaran
5. Pertanggungjawaban

Pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatandan Belanja Sekolah

(RAPBS). Ada beberapa hal yang berhubungan dengan penyusunan RAPBS, antara lain:

1. Penerimaan
2. Penggunaan
3. Pertanggungjawaban

Pengelolaan akan dianggap efektif apabila merujuk pada Rencana Anggaran Pendapatan danBelanja Sekolah (RAPBS) untuk satu tahun pelajaran, para kepala sekolah bersama smua pemegangperan di sekolah pada umumnya menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Merancang suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tahun pelajaran yang bersangkutan.
2. Melakukan inventarisasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan dana penunjang.
3. Melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat dihimpun.
4. Menerapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang bersangkutan.
5. Melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing kegiatan (Depdiknas, 2000:178-179)

6. Menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu format yang telah disepakati untuk digunakan oleh setiap sekolah.
7. Pengesahan dokumen RAPBS oleh instansi yang berwenang.

Dengan tersedianya dokumen tertulis mengenai RAPBS tersebut Kepala Sekolahdapat mengkomunikasikannya secara terbuka kepada semua pihak yang memerlukan. Sumberdana yang tersedia di dalam RAPBS di manfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatanmanajemen operasional sekolah pada tahun pelajaran yang bersangkutan. Pada umumnyapengeluaran dana yang dihimpun oleh sekolah mencakup 5 kategori pembiayaan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan rehabilitasi dan pengadaan sarana/prasarana Pendidikan.
2. Peningkatan kegiatan dan proses belajar mengajar.
3. Peningkatan kegiatan pembinaan Kesehatan.
4. Dukungan biaya kegiatan sekolah dan peningkatan personil.
5. Kegiatan rumah tangga sekoalh dan BP3.

Dana yang tersedia di dalam RAPBS dapat sekaligus mencakup kegiatan untukpengembangan sekolah. Namun demikian dana untuk keperluan pengembangan sekolahdapat

disediakan secara khusus, sebagai tambahan dari RAPBS yang telah disusun. Untukmencapai suatu tujuan tertentu yang telah diprogramkan sekolah dalam satu tahun pelajaran, diperlukan tersedianya sejumlah dana tertentu pula. Berapa besarnya dana yang diperlukanoleh sekolah agar tujuan itu dapat dicapai telah dihitung secara cermat oleh setiap sekolahmelalui penyusunan RAPBS. Apabila jumlah dana yang diperlukan pada satu tahunpelajaran dibagi dengan jumlah semua siswa kelas I, II dan III di sekolah itu, maka akanditemukan Satuan Harga Per Siswa (SHPS). Jumlah dana yang diperlukan oleh setiapsekolah sangat beragam. Jumlah siswa pada setiap sekolah pun berbeda-beda. Oleh karenaitu SHPS pada masing-masing sekolah dengan sendirinya akan berbeda pula. Meskipundemikian sebenarnya harus ada suatu patokan SHPS minimal agar suatu mutu pendidikantertentu dapat dicapai secara nasional.

E. Kedudukan Biaya dalam Manajemen Keuangan Sekolah

Perkembangan ilmu manajemen yang semakin kompleks, ternyata menjadikan istilah manajemen keuangan sering diganti dengan istilah manajemen pembiayaan. Penggantian tersebut membuktikan bahwa penggunaan dana

untuk membiayai setiap kegiatan semakin memperoleh perhatian yang lebih besar dari pada sekedar menghimpun dana. Gitosudarmo (1992:226) berpendapat ada enam aspek yang harus diperhatikan dalam manajemen pembiayaan yaitu: (1) tujuan-tujuan perusahaan sebagai keseluruhan dan tujuan-tujuan finansialnya; (2) saat kapan kebutuhan dana itu diperlukan; (3) berapa besarnya dana dan untuk berapa lama kebutuhan dana itu diperlukan; (4) alokasi dari pada kebutuhan dana agar diperoleh efisiensi kerja serta hasil yang maksimal; (5) dari mana dana tersebut dapat diambil; (6) cara pengendalian dana yang ditarik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa: (1) penggunaan biaya merupakan bagian integral dari keseluruhan proses manajemen; (2) penggunaan biaya menempati posisi strategis oleh karena sangat menentukan ketepatan alokasi dana kepada berbagai kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan di sekolah; (3) penggunaan biaya membutuhkan dukungan dari fungsi-fungsi manajemen yang lain yaitu fungsi perencanaan dan evaluasi secara baik.

BAB 5

DISTRIBUSI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

A. Pengertian Distribusi

Distribusi berakar dari bahasa inggris distribution yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya to distribute, berdasarkan Kamus Inggris Indonesia John M, Echols dan Hassan Shadilly dalam Damsar (2009:93) bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan, dan mengageni. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi dimaksudkan sebagai penyalur (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Jadi berdasarkan rujukan di atas, distribusi dapat dimengerti sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Dalam kegiatan distribusi diperlukan adanya sarana dan tujuan sehingga kegiatan distribusi dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.

Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dilakukan dalam pemasaran yaitu untuk mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ketangan konsumen sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.

Pemilihan proses distribusi merupakan suatu masalah yang sangat penting sebab kesalahan dalam pemilihan proses distribusi dapat memperlambat proses penyaluran barang atau jasa sampai ketangan konsumen atau pemakai.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengertian distribusi, berikut ini dikemukakan pendapat dari beberapa ahli antara lain:

Menurut Gugup Kismono (2001:364), Distribusi adalah perpindahan barang dan jasa dari produsen kepemakai industri dan konsumen.

Menurut Sofyan Assauri (2004:83) distribusi merupakan suatu lembaga yang memasarkan produk, yang berupa barang atau jasa dari produsen ke konsumen.

C. Glenn Walters dalam Angipora (2002:295), Distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari satu produk untuk menciptakan penggunaan pasar tertentu.

Distribusi adalah kegiatan yang terlibat dalam pengadaan dan penggunaan semua bahan yang dipergunakan untuk memproduksi barang jadi, kegiatan ini meliputi pengendalian produksi dan penanganan bahan dan penerimaan. (Charles A. Taff, 1998:87)

Sedangkan menurut Keegan (200:136) distribusi adalah sistem yang menghubungkan manufaktur kepada pelanggan, saluran konsumen dirancang untuk menempatkan produk tersebut ditangan orang-orang untuk digunakan sendiri, sedangkan saluran barang industri menyampaikan produk ke manufaktur atau organisasi yang menggunakan produk tersebut dalam proses produksi atau dalam operasi sehari-hari.

Menurut pandangan Islam konsep distribusi adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.

B. Biaya Pendidikan

Konsep biaya bisa dirujuk dari beberapa pakar, diantaranya Mulyono (2010;81) menyatakan biaya adalah suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan memengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi mencapai tujuannya. Di samping itu Mulyadi (2014) mengelompokkan konsep biaya dalam arti sempit yaitu sebagai

pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Sedangkan dalam arti luas biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi dan kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dari definisi ini biaya bisa dibagi dalam empat unsur, yakni 1) pengorbanansumberekonomi, 2) diukurdalamsatuanuang, 3) yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi, 4) pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.

Kata biaya dalam pendidikan jika diimplementasikan merupakan sebuah proses sehingga disebut dengan pembiayaan. Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dari kata asli biaya ditambah awalan pe dan akhiran an (Depdikbud 1995). Memaknai tentang biaya pendidikan, dalam alam pikiran manusia tentunya akan mengarah pada sejumlah barang dan jasa yang diperlukan dalam proses pendidikan itu sendiri. Al Kadri (2011;1) menjelaskanbiayapendidikanadalahnilai ekonomidari input biayapendidikan itu juga identik dengansemua pengorbanan yang diperlukan untuk suatu proses penyelenggaraan pendidikan yang dinyatakan dalam bentuk uang menurut harga pasar yang sedang berlaku menjadi tanggung jawab pemerintah, (public cost) dan masyarakat dan orang tua peserta didik (private cost). Public cost adalah biaya

pendidikan dari pemerintah, yang secara umum bersumber dari pajak, pinjaman, dan penerimaan lainnya (hibah) baik dalam dan luar negeri, sedangkan private cost adalah biaya pendidikan yang dibebankan kepada individu peserta didik dan masyarakat (seperti: biaya sekolah, pembelian buku dan peralatan sekolah lainnya).

Bagi seseorang analis keuangan, biaya pendidikan maknanya barangkali tidak seluas kajian keuangan makro. Dalam pikiran banyak pihak biaya pendidikan mungkin kecil hanya mempertemukan antara system's input, objectives, outputs, dan benefits. Padahal dalam kepentingan memajukan bangsa, mencerdaskan masyarakat, maka analisis biaya pendidikan menjadi alat untuk memperbaiki kinerja dan perencanaan sistem pendidikan dimasa datang.

Untuk memahami konsep biaya pendidikan secara utuh dan mendalam ada beberapa pemahaman yang bisa dielaborasi, antara lain opportunity cost or sacrifice cost, money cost versus financial cost, factor cost, current cost versus capital cost, total expenditures, current versus constant prices, public versus private cost, dan unit cost (Buchanan, J.M., 1979).

Opportunity cost or sacrifice cost bisa dipahami sebagai biaya kesempatan atau peluang yang hilang selama mengikuti

pendidikan baik formal maupun non formal diukur dari nilai uang yang hilang karena kesempatan/peluang yang ada tidak digunakan sebagaimana mestinya. Misalnya seorang mahasiswa yang sudah berusia produktif bisa bekerja sebagai karyawan, staf namun kesempatan itu tidak bisa diambilnya karena fokus untuk menyelesaikan pendidikan.

Biaya pendidikan selanjutnya dikenal dengan istilah resource cost versus money costs. Dimana resource cost itu merupakan adalah biaya pendidikan yang diukur dalam bentuk unit fisik, seperti: jam guru mengajar, jumlah buku yang dipergunakan, luas lantai yang dibangun, dan lain-lainnya. Sedangkan money cost atau financial cost merupakan biaya yang harus dibayar untuk setiap siswa melalui sistem pembiayaan pendidikan.

Biaya pendidikan lainnya disebut juga factors cost yang dibayar oleh sistem pendidikan untuk beberapa faktor produksi sebagai resource inputs, seperti: gaji guru, pembelian perlengkapan, pengadaan peralatan, pembangunan gedung.

Dalam hal layanan pendidikan, kita bisa mengategorikan biaya pendidikan dalam bentuk current cost versus capital costs. Kedua biaya pendidikan itu, didasarkan atas lamanya pemberian layanan pendidikan terhadap resource input (peserta didik), dimana current cost

berhubungan dengan pengeluaran yg dikeluarkan dalam memberikan pelayanan terhadap resource input dan perlengkapan yang digunakan dalam satu tahun fiskal, serta ada pembaharuan secara reguler. Begitu juga capital cost berhubungan dengan pengeluaran yang terdiri dari berbagai item-item yang menyumbangkan kegunaan pelayanan pendidikan yang berlangsung lebih dari satu tahun fiskal, contoh: biaya pembangunan gedung, renovasi ruang kelas. Capital cost harus diamortisasi sesuai umurnya dan dibebankan pada periode pelayanan (Ferdi, W.P., 2013).

Setelah kita mengetahui biaya pendidikan, besarannya, komponen yang bertanggung jawab dalam membayarnya tentu kita mesti mengenali pembiayaan pendidikan dalam konteks mengetahui sumber pendapatan dan sumber daya yang tersedia untuk digunakan memformulasikan dan mengoperasionalkan lembaga- lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi dan pondok pesantren). Pembiayaan pendidikan sangat bervariasi tergantung dari kondisi masing-masing negara maupun daerah seperti kondisi geografis, tingkat kemahalan, kondisi politik, hukum, kekuatan ekonomi, program pembiayaan pemerintah dan sistem administrasi di masing-masing Lembaga pendidikan itu sendiri. Untuk mengetahui apakah pembiayaan yang sudah tersedia sudah

memuaskan. Hal ini dilihat dari perspektif: a) proporsi dari kelompok usia, jenis kelamin, tingkat buta huruf; b) distribusi alokasi sumber daya pendidikan secara efisien dan adil sebagai kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah mensubsidi layanan pendidikan dibandingkan dengan sektor lainnya, c) dukungan orang tua siswa dan masyarakat sebagai komponen yang strategis dalam membiayai pendidikan.

Keputusan dalam pembiayaan lembaga pendidikan akan memengaruhi bagaimana sumber daya yang diperoleh dan dialokasikan. Oleh karena itu perlu dikaji siapa yang akan dididik dan seberapa banyak peserta didik dapat menikmati layanan pendidikan, bagaimana mereka akan dididik, siapa yang akan membayar biaya pendidikan itu.

Demikian pula pembiayaan pendidikan seperti apa yang perlu dilakukan pemerintah, agar mampu memberikan kontribusi secara signifikan mendukung pembiayaan lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah maupun swasta. Pembiayaan pendidikan perlu juga dilihat dari faktor kebutuhan dan ketersediaan pendidikan, tanggung jawab orang tua dalam menyekolahkan anaknya vs social benefit secara luas yang akan didapatkan, pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan.

J. Wiseman (1987) dalam Rosita, T., Nasoha, M., & Isman, S.M. (2013) menjelaskan ada tiga aspek yang perlu dikaji dalam melihat apakah pemerintahan perlu terlibat dalam masalah pembiayaan pendidikan 1) kebutuhan dan ketersediaan pendidikan terkait dengan sektor pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu alat perdagangan dan kebutuhan akan investasi dalam sumberdaya manusia/human capital; 2) pembiayaan pendidikan terkait dengan hak orang tua dan murid untuk memilih menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang akan berdampak pada social benefit secara keseluruhan; 3) pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan.

Lebih khusus Levin (1987) dalam Rosita, T., Nasoha, M., & Isman, S. M. (2013) melihat pembiayaan pada level sekolah merupakan proses dimana stakeholders sekolah mengetahui besaran pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah. Pembiayaan sekolah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan program pembiayaan Negara untuk sector pendidikan. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam mengetahui pembiayaan sekolah, yakni school revenues, school expenditures, capital dan current cost. Dalam pembiayaan sekolah tidak ada pendekatan tunggal dan yang

paling baik untuk pembiayaan semua sekolah karena kondisi tiap sekolah berbeda.

Setiap kebijakan dalam pembiayaan akan memengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan. Dengan mengkaji berbagai peraturan dan kebijakan yang berbeda-beda di sektor pendidikan, kita bisa melihat konsekuensinya terhadap pembiayaan pendidikan, yakni: 1) sasaran pendidikan, tentang siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidikan dapat disediakan, 2) proses pendidikan, tentang bagaimana mereka dididik, 3) penanggung jawab berkaitan dengan siapa yang akan membayar biaya pendidikan, 4) keputusan tentang sistem pembiayaan pendidikan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung pembiayaan di lembaga pendidikan.

Untuk menganalisis pernyataan di atas, ada dua hal pokok yang harus dipertegas, yakni: i) bagaimana sumber daya pendidikan akan diperoleh, ii) bagaimana sumber daya pendidikan dialokasikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan/tipe sekolah/kondisi daerah yang berbeda. Terdapat dua kriteria untuk menganalisisnya, yakni, i) efisiensi terkait dengan keberadaan sumber daya yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pelaku pendidikan dan ii) keadilan yang terkait dengan benefits dan cost yang seimbang.

Dalam hal pendidikan kejuruan dan industri, M. Woodhall (1987)

Triwiyanto, T. (2011) menjelaskan bahwa di masa lalu pembiayaan pendidikan jenis ini ditanggung oleh korporasi yang menyediakan CSR (corporate social responsibility), baik untuk para pekerjanya, maupun masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Apalagi sekarang ini peran pemerintah semakin besar dalam pembiayaan kejuruan sebagai bentuk komitmen menciptkan link and match antara lembaga pendidikan dan dunia kerja. Hal itu disebabkan adanya kepentingan ekonomi. Artinya kebijakan ketenagakerjaan, diharapkan dapat meningkatkan kepentingan untuk membagi biaya dan manfaat dari pendidikan ini dengan adil.

C. Sumber Biaya Pendidikan

Dalam pengeluaran pembiyaan pendidikan, ada beberapa sumber sumber yang dapat di alokasi pada pembiyaan pendidikan, di antarnya tergolong atas biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua / wali siswa, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua / wali siswa, dan lembaga pendidikan itu sendiri. Untuk biaya pada tingkat sekolah, berasal dari:

a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pembiayaan pendidikan nasional disusun dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah kita menegaskan mengenai pembiayaan pendidikan melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan ini pemeritah sudah mempunyai per undang undangan dalam hal pembiyaan pendidikan nasional, bantuan tersbut berupa:

1) Dana BOS

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin yaitu yang dalam membiayai pendidikan kurang memenuhi. Dana BOS merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung ke lembaga pendidikan baik Negeri maupun Swasta dimana besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (unit cost) bantuan. BOS memberikan dana untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah. Sebagai

wujud perhatian terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana bantuan operasional tersebut, sekolah diwajibkan untuk membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa. Secara umum, Program BOS cenderung dilaksanakan sebagai subsidi umum. Hal ini terjadi karena Program BOS memiliki cakupan yang luas dan merata, baik dilihat dari jumlah sekolah maupun jumlah siswa. Sekolah yang menolak Program BOS ini hanya sebagian kecil saja dan umumnya sekolah yang relatif kaya. Keputusan untuk menolak Program BOS tersebut dilakukan secara sepihak oleh pengelola sekolah, tanpa bermusyawarah dengan orangtua siswa.

2) Dana BSM

Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap siswa miskin. Tujuan pemberian dana ini adalah untuk mencegah siswa miskin dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan di sekolah dan juga memberi peluang/kesempatan yang lebih besar kepada siswa miskin untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan

pendidikannya. Sasaran pemberian bantuan dana BSM ini dikhususkan bagi siswa yang kurang mampu/miskin saja.

b. Orang Tua/ Wali Siswa

Selain pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sekolah juga memperoleh pembiayaan pendidikan dari orang tua / wali siswa atau yang biasa disebut dengan pengeluaran keluarga atau bisa di sebut dengan infak dan SPP bulanan. Pengeluaran keluarga untuk pendidikan dasar dan menengah itu banyak sekali jenisnya. Berikut ini ditunjukkan komponen-komponen biaya yang ditanggung oleh orang tua/wali siswa, meskipun tidak semua komponen berlaku untuk semua sekolah, namun data ini mampu memberikan gambaran tentang banyaknya pengeluaran orang tua siswa, bahkan untuk hal-hal yang menurut aturan "tidak lagi dibenarkan" dipungut di sekolah.

Jenis-jenis pengeluaran orang tua/wali siswa untuk pendidikan antara lain:

1) Uang Pangkal
2) Uang Sekolah Bulanan / SPP
3) Biaya Ulangan Tengah Semester

4) Biaya Ulangan Akhir Semester
5) Biaya Kegiatan Ekstrakurikuler
6) Biaya Kegiatan Praktikum
7) Pembelian Buku Pelajaran / LKS
8) Pembelian Pakaian Seragam Sekolah
9) Biaya Karyawisata / Bina Mental / Retret
10) Sumbangan Sosial (APP dan AAP)
11) Biaya-biaya lainnya.

Peran serta orang tua / wali siswa dalam pendidikan bertujuan untuk ikut serta memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan. Dengan demikian terjalinya kerja sama yang baik antara orang tua murid/siswa dengan guru agar terlaksananya pendidikan sesuai yang di harapkan.

D. Komponen Biaya Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 3, biaya pendidikan meliputi:

1. Biaya satuan pendidikan, terdiri dari:
   a. Biaya investasi, yang terdiri atas:
      1) Biaya investasi lahan pendidikan
      2) Biaya investasi selain lahan pendidikan

b. Biaya operasi, yang terdiri atas:
    1) Biaya personalia
    2) Biaya nonpersonalia
c. Bantuan biaya pendidikan
d. Beasiswa

2. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, meliputi
    a. Biaya investasi, yang terdiri atas:
        1) Biaya investasi lahan pendidikan
        2) Biaya investasi selain lahan pendidikan
    b. Biaya operasi, yang terdiri atas:
        1) Biaya personalia
        2) Biaya nonpersonalia
        3) Biaya pribadi peserta didik

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 62, pembiayaan pendidikan terdiri dari:

1. Biaya investasi, meliputi biaya:
    a. Penyediaan sarana dan prasarana
    b. Pengembangan sumber daya manusia
    c. Modal kerja tetap

2. Biaya personal, meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan
3. Biaya operasi, meliputi:
    a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji
    b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai
    c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya

Nanang Fattah (2009: 23) menyatakan biaya pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa seperti pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (earning forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Menurut Dedi Supriadi (2010: 4) dalam teori dan praktik pembiayaan pendidikan, baik pada tatanan makro maupun mikro, dikenal beberapa kategori biaya pendidikan, yaitu:

1. Biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost)

   Biaya langsung merupakan semua pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya tidak langsung merupakan pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, misalnya biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan, dan harga kesempatan (monetary cost).

2. Biaya pribadi (private cost) dan biaya sosial (social cost)

   Biaya pribadi merupakan pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau dikenal juga pengeluaran rumah tangga (household expenditure). Biaya sosial merupakan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihitung oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pada dasarnya termasuk biaya sosial.

3. Biaya dalam bentuk uang (monetary cost) dan bukan uang (nonmonetary cost).

   Dadang Suhardan, Riduwan, & Enas (2012: 23-26) mengategorikan biaya pendidikan ke dalam enam jenis, yaitu:

   1) Biaya Langsung (Direct Cost)

      Biaya pendidikan langsung (direct cost) adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa, dan keluarga siswa. Biaya langsung, berwujud dalam bentuk pengeluaran uang yang secara langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat, gaji guru dan pegawai lainnya, buku, bahan perlengkapan, serta biaya perawatan.

   2) Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost)

      Biaya tidak langsung (indirect cost), berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar untuk keperluan sekolah, biaya ini dikeluarkan tidak langsung digunakan oleh lembaga pendidikan, melainkan dikeluarkan oleh keluarga, anak atau orang yang menanggung biaya peserta didik yang mengikuti pendidikan. Biaya tidak langsung adalah biaya hidup yang menunjang kelancaran pendidikan. Misalnya biaya

transportasi ke sekolah, sewa indekos, biaya makan sehari-hari, biaya kesehatan, biaya belajar tambahan adalah biaya seperti pendapatan yang hilang ketika siswa belajar.

3) Private Cost

Private cost adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan keluarga, atau semua biaya yang harus ditanggung dan dikeluarkan oleh keluarga anak untuk keberhasilan belajar anaknya. Misalnya keluarga membayar guru les privat supaya anaknya pandai bahasa inggris dan matematika, keluarga juga mengeluarkan uang tambahan supaya anak pandai menggunakan komputer.

4) Social Cost

Social cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat, baik perorangan maupun terorganisasi untuk membiayai seluruh keperluan belajar.

5) Monetary Cost

Selain pengeluaran dalam bentuk uang atau materi, ada juga biaya yang harus dikeluarkan tidak dalam bentuk tersebut, biaya dapat berbentuk jasa, tenaga, dan waktu, biaya semacam ini dapat diuangkan atau dinilai dan disetarakan kepada/dengan nilai uang. Biaya yang

dikeluarkan untuk keperluan semacam ini disebut biaya moneter atau disebut "Monetary Cost".

6) Biaya Belajar

Biaya belajar yang dikeluarkan oleh siswa di berbagai jenjang pendidikan tidak selalu seragam tergantung pada jenis pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK. Dari beberapa pemaparan di atas disimpulkan bahwa biaya pendidikan terdiri dari biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan pendidikan, dan biaya personal. Pengeluaran yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan disebut biaya langsung sedangkan pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan disebut biaya tidak langsung. Biaya pendidikan dikatakan biaya pribadi ketika dikeluarkan oleh keluarga peserta didik dan dikatakan sebagai biaya sosial ketika dikeluarkan oleh masyarakat. Baik biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya pribadi, maupun biaya sosial dapat berbentuk uang dan bukan uang.

E. Efisiensi Pembiayaan

Konsep efisiensi selalu dikaitkan dengan efektivitas. Karena dari sudut pandang ekonomi, efektivitas merupakan hagian dari konsep efisiensi sebab tingkat efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan relatif terhadap harga yang dimunculkan. Dalam dunia pendidikan, efisien dan efektif cenderung ditandai dengan pola penyebaran dan pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang sudah ditata secara efisien dengan pengelolaan yang efektif. Program pendidikan yang efektif dan efisien seharusnya mampu menciptakan keseirnbangan antara penyediaan dan kebutuhan akan sumber-sumber pendidikan dan dapat mencapai tujuan tanpa mengalami hambatan yang berarti. Efektif adalah terkait dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner (2004) mendefmisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena menurutnya efektif tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi.

Manajemen pembiayaan dikatakan memenuhi prinsip efektif apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengatur biaya aktivitas dalam rangka memcapai tujuan kualitatif outcomes sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas biaya adalah kemampuan pembiayaan mencapai sasaran dan target sesuai dengan yang direncanakan.

Ada beberapa prinsip dalam menilai efektivitas pembiayaan pendidikan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menilai efektivitas yang berkaitan dengan problem tujuan dm alat untuk memproses input menjadi output.
2. Sistem yang dibandingkan hams samd honlogen, misalnya tingkat pendidikan, kecakapan, social ekonomi dll.
3. Mempertimbangkan semua output, seperti jumlah siswa lulus dan kualitas kelulusan.
4. Korelasi diharapkan bersifat kualitas, hubungan antara alat proses dan output harus berkualitas.

Sementara itu, nilai efisiensi dikaji dari sudut icemampuan menggunakan biaya dengan baik dan tepat. Pembiayaan dikatakan efisien ketika pencapaian sasaran atau target diperoleh dengan pengorbanan yang lebih kecil atau dengan biaya yang minimum. Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara masukan (input) dan kuadran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya dan perbandingan tersebut dapat dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya. Artinya adalah bahwa kegiatan pembiayaan pendidikan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya sekecil-kecilnya tapi dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Jika dilihat

dari segi hasil, kegiatan pembiayaan pendidikan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya. Uraian di atas menjelaskan bahwa tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggilah yang akan memungkinkan terselenggaranya pelayanan pendidikan pada masyarakat secara memuaskan dengan samber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

BAB 6

PRODUKTIVITAS DAN EFISIENSI SISTEM KEPENDIDIKAN

A. Tujuan Pengukuran Produktivitas

Istilah produktivitas muncul pertama kali pada tahun 1966 dalam suatu masalah yang di susun oleh sarjana ekonomi prancis bernama Quesnay, teteapi menurut (Sumarsono 2003) Walter Aigner filosofi dan spirit tentang produktivitas sudah ada sejak mulai peradaban manusia karena makna dari prodktivitas adalah keinginan serta upaya manusia untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan disegala bidang. Produktivitas adalah perbandingan antara output dengan input jika produktivitas naik Ini hanya dimungkinkan oleh adanya penignkatan efisiensi (waktu, bahan, tenaga) dan sistem kerja, teknik produksi dan adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerja (Hasibun 2005). Lain halnya menurut (Zainun 2004) menyatakan bahwa ada beberapa fsktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya semangat kerja karyaan dalam suatu organisasi yaitu: komunikasi, kepuasan kerja, partisipasi, motivasi, dan kepemimpinan. Menurut (Blocher Chen Lin 2000)

Produktivitas adalah hubungan antara berapa output yang dihasilkan dan berapa input yang dibutuhkan untuk memproduksi output tersebut. Sedangkan menurut (Sedarmayanti 2004) Produktivitas tidak lain dari pada berbicara mengenai tingkah laku manusia atau individu, yaitu tingkah laku produktivitasnya. Lebih khusus lagi di bidang kerja atau organisasi kerja.

Dari semua istilah menurut pakar ilmuan diatas bahwasannya produktivitas adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan barang dan jasa dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara maksimal sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu pekerjaan.

Pengukuran produktivitas merupakan suatu alat manajemen yang penting disemua tingkatan ekonomi. Pengukuran produktivitas berhubungan dengan perubahan produktivitas sehingga usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas dapat dievaluasi. Pengukuran dapat juga bersifat propektif dan sebagai masukan untuk pembuatan keputusan strategik. Pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Tujuan pengukuran ini adalah untuk menilai apakah efisiensi produktif meningkat

atau menurun. Hal ini berguna sebagai informasi untuk mentusun strategi bersaing dengan prusahaan lain.

Menurut (Blocher, et al., 2007) menjelaskan bahwa ukuran produktivitas bisa dilihat dengan dua cara yaitu produktivitas operasional dan produktivitas finansial. Produktivitas opersional adalah rasio unit output terhadap unit input. Baik pembilang maupun penyebutnya merupakan ukuran fisik (dalam unit). Menurut (Basu Swasta, 2002) produktivitas merupakan salah satu alat ukur bagi perusahaan dalaam menilai prestasi kerja yang dicapai karyawannya. Produktivitas adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara modal, tanah, energi yang dipakai untuk menghasilkan hasil tersebut. Produktivitas finansial juga merupakan rasio output terhadap input, tetapi angka pembilang atau penyebutnya dalam satuan mata uang (rupiah). Ukuran produktivitas tidak sama dengan efisiensi. Efisiensi merupakan ukuran dalam membandingkan penggunaan input yang direncanakan dengan realisasi penggunaan masukan. Jika masukan yang sebenarnya digunakan makin besar penghematannya maka tingkat efisiensi semakintinggi. Menurut (Hasibuan, 2005) produktivitas merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan serta

mengutamakan cara pemanfaatan baik terhadap sumber sumber dalam memproduksi suatu barang atau jasa.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pribadi yang produktif menggambarkan potensi, presepsi dan kreativitas seseorang yang senantiasa ingin menyumbangkan kemampuannya agar bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Secara teknis, produktivitas merupakan suatu perbandingan antara output dengan input.

B. Manfaat Pengukuran Produktivitas

Kegiatan pengukuran produktivitas perlu dilakukan oleh setiap perusahaan agar dapat diketahui bagaimana kondisi system pendidikannya, apakah tingkat produktivitasnya telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau belum. Dengan melakukan pengukuran produktivitas, secara langsung evaluasi terhadap hasil pengukuran dapat dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan hasil pengukuran dengan produktivitas standar yang telah ditetapkan manajemen.
2. Melihat bagaimana perbaikan produktivitas telah terjadi dari waktu ke waktu.
3. Membandingkan dengan produktivitas industri sejenis yang menghasilkan produk serupa.

C. Model Sistem Sosial untuk Sekolah

Kata sekolah berasal dari Bahasa Latin yaitu: skhole, scola, scolae atau skhola yang memiliki arti: waktu luang atau waktu senggang, dimana ketika itu sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang itu adalah mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf dan mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni).

Untuk mendampingi dalam kegiatan sekolah anak-anak didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai pelajaran di atas. Namun saat ini kata sekolah telah berubah arti menjadi suatu bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah. Kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah. Jumlah wakil kepala sekolah di setiap sekolah berbeda-beda tergantung dengan kebutuhannya. Bangunan sekolah disusun meninggi untuk memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi

dengan fasilitas yang lain. Ketersediaan sarana dalam suatu sekolah mempunyai peran penting dalam terlaksananya proses pendidikan.

Ukuran dan jenis sekolah bervariasi tergantung dari sumber daya dan tujuan penyelenggara pendidikan. Sebuah sekolah mungkin sangat sederhana di mana sebuah lokasi tempat bertemu seorang pengajar dan beberapa peserta didik, atau mungkin, sebuah kompleks bangunan besar dengan ratusan ruang dengan puluhan ribu tenaga kependidikan dan peserta didiknya. Berikut ini adalah sarana prasarana yang sering ditemui pada institusi yang ada di Indonesia, berdasarkan kegunaannya:

1. Ruang Belajar

   Ruang belajar adalah suatu ruangan tempat kegiatan belajar mengajar dilangsungkan. Ruang belajar terdiri dari beberapa jenis sesuai fungsinya yaitu:

   Ruang kelas atau ruang Tatap Muka, ruang ini berfungsi sebagai ruangan tempat siswa menerima pelajaran melalui proses interaktif antara peserta didik dengan pendidik, ruang belajar terdiri dari berbagai ukuran, dan fungsi. Sistem kelas terbagi 2 jenis yaitu kelas berpindah (moving class) dan kelas tetap.

Ruang Praktik/Laboratorium ruang yang berfungsi sebagai ruang tempat peserta didik menggali ilmu pengetahuan dan meningkatkan keahlian melalui praktik, latihan, penelitian, percobaan. Ruang ini mempunyai kekhususan dan diberi nama sesuai kekhususannya tersebut, diantaranya:

1) Laboratorium Fisika/Kimia/Biologi,
2) Laboratorium bahasa,
3) Laboratorium komputer,
4) Laboratorium Pendidikan Agama (Musholla, Microteaching, dll)
5) Ruang keterampilan, dll

2. Ruang Kantor

   Ruang kantor adalah suatu tempat dimana tenaga kependidikan melakukan proses administrasi sekolah tersebut, pada institusi yang lebih besar ruang kantor merupakan sebuah gedung yang terpisah.

3. Perpustakaan

   Sebagai satu institusi yang bergerak dalam bidang keilmuan, maka keberadaan perpustakaan sangat penting. Untuk meminjam buku, murid terlebih dahulu harus mempunyai kartu peminjaman agar dapat meminjam sebuah buku.

4. Halaman/Lapangan

Merupakan area umum yang mempunyai berbagai fungsi diantaranya:

1) Tempat upacara
2) Tempat olahraga
3) Tempat kegiatan luar ruangan
4) Tempat latihan
5) Tempat bermain/beristirahat
6) Lain-lain
7) Kantin/cafeteria
8) Ruang organisasi peserta didik (OSIS, Pramuka, Senat Mahasiswa, dll)
9) Ruang Komite
10) Ruang keamanan
11) Ruang produksi, penyiaran dll.
12) Ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS)

Di Indonesia, sekolah menurut statusnya dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1) Sekolah negeri, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi.
2) Sekolah swasta, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh non-pemerintah/swasta, penyelenggara berupa

badan berupa yayasan pendidikan yang sampai saat ini badan hukum penyelenggara pendidikan masih berupa rancangan peraturan pemerintah.

Pengertian Sistem Sosial

"Sistem sosial" merupakan ciptaan dari manusia, dalam hal ini "sistem sosial" terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. Istilah "sistem" berasal dari bahasa Yunani "Systema" yang mempunyai pengertian yakni:

a. Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian.
b. Hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur.

Jadi, dengan kata lain istilah "systema" itu mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan. (Sumber: Tatang M. Amirin, Drs.).

Sedangkan pengertian "sistem sosial", menurut Jabal Tarik Ibrahim dalam bukunya Sosiologi Pedesaan, adalah sejumlah kegiatan atau sejumlah orang yang mempunyai hubungan timbal balik relatif konstan. Hubungan sejumlah orang dan kegiatannya itu berlangsung terus menerus. Dari tiga hal di atas terdapat tiga hal pokok, yaitu:

a. Dalam setiap "sistem sosial" ada sejumlah orang dan kegiatannya.
b. Dalam sustu "sistem sosial", orang-orang dan atau kegiatan-kegiatan itu berhubungan secara timbal-balik.
c. Hubungan yang bersifat timbal-balik dalam suatu "sistem sosial" bersifat konstan.

Dari uraian tadi menunjukkan bahwa "sistem sosial" merupakan kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian (elemen atau komponen), yaitu:

a. Orang dan atau kelompok beserta kegiatannya.
b. Hubungan sosial, termasuk di dalamnya norma-norma, dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antar orang atau kelompok tersebut.

"Sistem sosial" merupakan ciptaan dari manusia, dalam hal ini "sistem sosial" terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. Ada beberapa hal yang membuat manusia menciptakan "sistem sosial", antara lain karena :

a. Manusia mempunyai kebutuhan dasar biologi tertentu seperti pangan, papan, sandang dan seks.
b. Untuk memuaskan kebutuhan ini, manusia tergantung pada organisasi-organisasi kemasyarakatan.
c. Kenyataan di atas menciptakan kebutuhan-kebutuhan lain, yaitu kebutuhan sistem pada diri individu.

d. Pada akhirnya manusia berusaha untuk memaksimumkan kepuasan dari kebutuhan dirinya.

"Sistem sosial" mempengaruhi perilaku manusia, karena di dalam suatu "sistem sosial" tercakup pula nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan aturan perilaku anggota-anggota masyarakat. Dalam setiap "sistem sosial" pada tingkat-tingkat tertentu selalu mempertahankan batas-batas yang memisahkan dan membedakan dari lingkungannya ("sistem sosial" lainnya). Selain itu, di dalam "sistem sosial".

Menurut Auguste Comte beberapa pokok pikiran penting yang terdapat dari organisma biologis ada kesamaanya dengan organisasi sosial. Alasan Comte:

1. Sosiologi dan biologi mempunyai hubungan yang sangat erat karena keduanya mempelajari organisma. Biologi mempelajari organisma tubuh organik sedangkan sosiologi mempelajari masyarakat organic atau organisma sosial.
2. Begitu dekatnya biologi dan sosiologi sehingga yang disebut dengan istilah masyarakat atau organisma sosial adalah terdiri dari keluarga-keluarga sebagai elemen atau sel, kelas-kelas atau lapisan dalam masyarakat adalah kelenjar-kelenjar, kota adalah organ-organnya.

3. Sosiologi dalam pandangan Comte merupakan ilmu poditif atau ilmu empiric yang dapat menggunakan metode ilmiah untuk membuat masyarakat menjadi lebih baik.
4. Comte sangat menganjurkan keteraturan social, keseimbangan dan membenci kekacauan.

Kehidupan sistem sosial harus dipandang sebagai suatu sistem yaitu sistem sosial yakni suatu keseluruhan bagian-bagian atau unsure-unsur yang saling berhubungan dalam satu kesatuan. Kehidupan sosial adalah kehidupan bersama manusia atau kesatuan manusia yang hidup dalam suatu pergaulan oleh karena itu kehidupan sosial pada dasarnya ditandai oleh:

a. Adanya manusia yang hidup bersama yang dalam ukuran minimalnya berjumlah dua orang atau lebih.
b. Manusia tersebut bergaul atau berhubungan dan hidup bersama dalam waktu yang cukup lama oleh karena itu terjadilah adaptasi dan pengorganisasian perilaku serta munculnya suatu perasaan sebagai kesatuan.
c. Adanya kesadaran bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
d. Suatu sistem kehidupan Bersama

Ciri-ciri interaksi social menurut Loomis:

1. Pihak yang berinteraksi berjumlah lebih dari satu orang

2. Adanya komunikasi antara pihak-pihak tersebut dengan menggunakan lambing-lambang tertentu
3. Adanya dimensi waktu yang mencakup masa lampau, masa kini, dan masa mendatang
4. Adanya tujuan-tujuan tertentu

Kehidupan sosial dapat dilihat dalam struktur social. Struktur sosial adalah suatu pergaulan hidup manusia meliputi barbagai tipe kelompok yang terjadi dari orang banyak dan meliputi pula lembaga-lembaga dimana orang banyak tadi ambil bagian.

Di dalam struktur sosial terdapat pranata atau lembaga sosial. Talcot parsons mengatakan pranata-pranata atau pola-pola kelembagaan adalah suatu aspek pokok mengenai apa yang digeneralisasikan merupakan struktur sosial.

Salah satu wujud dari struktur sosial adalah kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan kumpulan manusia tetapi bukan sembarang kumpulan. Suatu kumpulan manusia dapat dikatakan sebagai kelompok sosial apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan.
2. Adanya hubungan timbal balik antara yang satu dengan lainnya dalam kelompok itu.

3. Adanya suatu factor yang dimiliki bersama oleh anggota-aggota kelompok itu sehingga hubungan antara mereka bertambah erat.
4. Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku.

Seperti halnya sebagai berikut, Lembaga sosial (menurut selo soemarjan) dan Pranata sosial (menurut Koentjaraningrat).

Lembaga sosial/lembaga kemasyarakatan adalah himpunan dari norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kehidupan pokok di dalam kehidupan masyaarakat. Menurut Rosed dan Warren, lembaga sosial adalah pola-pola yang telah mempunyai kedudukan tetap atau pasti untuk mempertemukan macam-macam kebutuhan manusia yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan dengan mendapatkan persetujuan dengan cara-cara yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi untuk memenuhi konsep kesejahteraan masyarakat dan menghasilkan suatu struktur.

"Pranata keluarga, pendidikan, ekonomi, agama" Menurut Koentjaraningrat.

Margono Slamet: pranata keluarga, ekonomi, pemerintahan, agama dan norma-norma, pendidikan dan penerangan umum, dan kelas masyarakat.

Suatu sistem sosial yang menjadi pusat perhatian barbagai ilmu sosial pada dasarnya merupakan wadah dari proses-proses dan pola-pola interaksi sosial.

Menurut Soryono Soekanto unsur-unsur pokok suatu sistem sosial adalah:

1. Kepercayaan yang merupakan pemahaman terhadap semua aspek alam semesta yang dianggap sebagai suatu kebenaran mutlak.
2. Perasaan dan pikiran yaitu suatu keadaan kejiwaan manusia yang menyangkut keadaan sekelilingnya baik yang bersifat alamiah maupun sosial.
3. Tujuan merupakan suatu cita-cita yang harus dicapai dengan cara mengubah sesuatu atau mempertahankannya.
4. Kaidah atau norma yang merupakan pedoman untuk bersikap/berperilaku secara pantas.
5. Kedudukan dan peranan: kedudukan merupakan posisi-posisi tertentu secara vertical sedangkan peranan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik secara structural maupun prosesual.
6. Penguasaan yang merupakan proses yang bertujuan untuk mengajak, mendidik, atau bahkan memaksa masyarakat untuk mentaati kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku.
7. Sanksi-sanksi positif dan negative.

8. Fasilitas
9. Keserasian dan kelangsungan hidup
10. Keserasian antara kualitas hidup dengan lingkungan

Sifat terbuka sistem sosial. Sistem sosial pada umumnya di dalamnya terjadi proses yang saling pengaruh mempengaruhi, hal ini terjadi karena adanya saling keterkaitan antara satu unsur dengan unsur lainnya atau satu bagian dengan bagian lainnya atau antara subsistem dengan subsistem lainnya.

Menurut Margono slamet mengatakan suatu sistem sosial dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ekologi, tempat, dan geografi (dimana masyarakat itu berada)
2. Demografi yang menyangkut populasi, susunan, dan cirri-ciri populasi
3. Kebudayaan menyangkut nilai-nilai sosial, sistem kepercayaan dan norma-norma dalam masyarakat
4. Kepribadian meliputi sikap mental, semangat, temperamen dan cirri-ciri psikologis masyarakat
5. Waktu

Emille Durkheim mengatakan konsep saling ketergantungan syaratnya adalah melihat masyarakat sebagai

suatu kesatuan dan masyarakat dilihat sebagai fakta social. Fakta sosial adalah kumpulan norma, nilai, dan sebagainya yang memaksa anggota masyarakat untuk tunduk dan patuh.

Solidaritas sosial: Keadaan menjadi satu atau bersahabat yang muncul karena adanya tanggung jawab bersama dan kepentingan bersama diantara para anggotanya. Tipe solidaritas sosial terbagi: solidaritas mekanik (biasanya di pedesaan) dan solidaritas organik (biasanya di perkotaan).

"social consciousness" = kesadaran social. Kesadaran sosial ini yaitu sadar akan adanya kelompok dimana kita termasuk di dalamnya.

Integrasi sosial: membuat unsur-unsur tertentu menjadi satu kebutuhan yang bulat dan utuh. Contoh konkret membuat masyarakat menjadi satu kesatuan yang bulat. Integrasi sosial: suatu usaha untuk membangun ketergantungan yang lebih erat antara bagian-bagian atau unsur-unsur dari masyarakat sehingga tercipta suatu kesadaran yang lebih harmonis yang memungkinkan terjalinnya kerja sama dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Sebagai sistem sosial, sekolah merupakan akumulasi komponen - komponen sosial integral yang saling berinteraksi dan memiliki kiprah yang bergantung antara satu sama lain.

Zamroni (2001) menyatakan bahwa pendekatan microcosmis melihat sekolah sebagai suatu dunia sendiri, yang di dalamnya memiliki unsur-unsur untuk bisa disebut suatu masyarakat, seperti pemimpin, pemerintahan, warga masyarakat atau aturan dan norma-norma serta kelompok-kelompok sosialnya.

Sesuai dengan pendekatan fungsional struktural, lembaga sekolah diibaratkan masyarakat kecil yang memiliki kekuatan organis untuk mengatur dan mengelola komponen-komponennya. Bagian-bagian tersebut diatur dan terintegrasi dalam naungan sistem kendali sosial berwujud organisasi formal. Pedoman formal merupakan rujukan fundamental dari seluruh latar belakang sikap dan perilaku para pengemban status dan peran di sekolah.

Pendekatan fungsional struktural melihat lingkungan sekolah pada hakikatnya merupakan susunan dari peran dan status yang berbeda-beda, dimana masing-masing bagian tersebut terkonsentrasi pada satu kekuatan legal struktural yang menggerakkan daya orientasi demi mencapai tujuan tertentu. Tentu saja sistem sosial tersebut bermuara pada status sekolah sebagai lembaga formal.

Keberadaan guru, siswa, kepala sekolah, psikolog atau konselor sekolah, orang tua, siswa, pengawas, administratur merupakan komponen-komponen fungsional yang

berinteraksi secara aktif dan menentukan segala macam perkembangan dinamika kehidupan sekolah sebagai organisasi pendidikan formal. Sehingga disini fungsional strukural melandasi pandangan kita untuk melihat berbagai peran dan status formal di sekolah sebagai satu-satunya pedoman mendasar atas segala aktivitas yang dilakukan oleh warganya.

Seluruh warga pengemban kedudukan telah tersosialisasi norma-norma sekolah sesuai dengan porsi statusnya sehingga menyokong terbinanya stabilitas sosial dalam sekolah. Manifestasi peran mendasar norma-norma sekolah telah mengikat warganya dalam nuansa integritas kesadaran yang tinggi.

Sementara itu, pendekatan konflik lebih menekankan porsi penilaian subjektif para pelaku peran di sekolah dan konsekuensi objektif atas wujud sekolah sebagai lembaga yang memelihara sistem kekuasaan. Pendekatan konflik melihat sisi lain dari tertibnya perilaku masyarakat sekolah dalam mengamalkan hasrat-hasrat individunya yang senantiasa patuh pada kekuatan normatif.

Lockwood melihat bahwa setiap situasi sosial selalu mengandung dua hal yakni tata tertib sosial yang bersifat normatif serta sub-stratum yang melahirkan konflik.

Tumbuhnya sistem nilai normatif sebagai acuan utama para pelaku peran di sekolah bukan berarti melenyapkan potensi-potensi konflik. Oleh sebab itu, stabilitas sosial yang dicerminkan oleh pengaturan peran dan status seperti guru, kepala sekolah, pejabat struktural sekolah, pengawas sekolah, murid, administratur sekolah, orang tua siswa, petugas kebersihan pada dasarnya mencerminkan bentuk pengaturan manifes atas masing-masing kepentingan yang sebenarnya saling bertentangan.

Secara lebih radikal beberapa penganut pendekatan konflik menegaskan bahwa tatanan sosial yang ada (termasuk di sekolah) merupakan hasil kekuasaan dominan baik itu bersumber dari paksaan secara fisik maupun kekerasan simbolik (symbolic violence). Artinya kelas sosial dominan memiliki simbol-simbol sosial yang menghegomoni kesadaran seluruh anggota agar sejalur dengan sistem nilai objektif yang pada hakikatnya banyak berpihak pada golongan atau kelas yang berkuasa.

Di dalam sekolah, seorang kepala sekolah selain memiliki kedudukan formal sebagai pemimpin sekolah ternyata juga mengindikasikan pertentangan kepentingan dan otonomi status lain yang lebih rendah, misalnya para guru, staf-staf administrasi dan sebagainya. Terhadap guru, ketika

seorang kepala sekolah menjalankan fungsi formalnya, maka ada titik pertentangan yang menggoyahkan otonomi peran guru dalam mengelola belajar mengajar. Di satu sisi kepala sekolah breharap agar siswa berhasil dalam belajar dengan proses pengajaran yang efektif, efisien serta mampu mencapai target penguasaan materi yang banyak. Di sisi lain, harapan yang melambangkan kepentingan status kepala sekolah tersebut tentunya membebani peran sekaligus otonomi kedudukan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas.

Faisal dan Yasik (1985) menyatakan bahwa dari pendekatan konflik bisa ditarik dua asumsi dasar yang muncul pada lembaga sekolah. Sebuah lembaga yang memiliki tujuan tertentu dan memelihara banyak status yang berbeda serta memiliki peran fungsional. Aneka ragam status tersebut dikelola melalui fungsifungsi otoritas legal formal dengan memanfaatkan prinsip-prinsip birokrasi. Dua asumsi tersebut yakni:

1) Potensi konflik dalam mengintegrasikan pemahaman satu tujuan sekolah kepada para pemegang status yang berbedabeda. Untuk satu tujuan pendidikan, masing-masing pengemban posisi akan memiliki daya tangkap sektoral yang berbedabeda dalam mengartikan hasil maupun proses pencapaian tujuan.

2) Sulitnya meraih kesamaan persepsi mengenai batas peran dan posisi pendidikan. Sebagai dampaknya, keadaan tersebut memicu konflik internal lintas posisi. Yang dimaksud konflik peranan internal adalah konflik harapan antarpihak dari pemegang posisi peran di sekolah. Para guru dihadapkan dengan harapan yang saling bertentangan dengan kepala sekolahnya, penilik, petugas konseling, administratur pendidikan, orang tua murid dan bahkan dari muridnya sendiri. Dari dua pendekatan utama di atas (fungsional struktural dan konflik) dapat diambil kesimpulan bahwa sekolah bukanlah sekadar kumpulan yang terdiri dari para pelaksana administrasi, guru dan murid dengan segala sifat dan pembawaan mereka masing-masing (Horton dan Hunt, 1999: 333). Lebih dari itu, sekolah merupakan suatu sistem sosial yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan mapan, interaksi, konfrontasi, konflik, akomodasi, maupun integrasi yang menentukan dinamika para warganya di sekolah. Oleh sebab itu, di dalam sekolah akan selalu mengandung unsur-unsur dan proses-proses sosial yang kompleks seperti halnya dinamika sosial masyarakat umum.

Beberapa unsur tersebut memproduk konsep-konsep sosial di dalam sekolah yakni sebagai berikut :

1) Kedudukan dalam Sekolah

Sekolah, seperti sistem sosial lainnya dapat dipelajari berdasarkan kedudukan anggota dalam lingkungannya. Setiap orang di dalam sekolah memiliki persepsi dan ekspektasi sosial terhadap kedudukan atau status yang melekat pada diri warga sekolah. Di sana kita memiliki pandangan tentang kedudukan kepala sekolah, guru-guru, staf administrasi, pesuruh, murid-murid serta asumsi-asumsi hubungan ideal antarbermacam kedudukan tersebut.

Hal ini selaras dengan pendapat Weber (dalam Robinson, 1981) tentang konsep tindakan sosial, dimana setiap orang memiliki ideal tipe untuk mengukur dan menentukan parameter mendasar tentang sebuah realitas. Realitas sosial yang tersebar dalam status sosial menjadi titik tolak kesadaran seorang individu untuk menentukan sikap, pandangan dan tindakan dalam lingkup social tertentu. Harapan ideal "kepala sekolah" merupakan kesadaran awal yang mempengaruhi sikap individu seorang pejabat kepala sekolah. Meskipun pada proses selanjutnya harus terkombinasi dengan pembawaan individu, prasangka terhadap status lain, hubungan-hubungan antarstatus serta

kaitannya dengan konstruksi total dari susunan status di sekolah.

Dalam mempelajari struktur sosial sekolah kita analisis berbagai anggota menurut kedudukannya dalam sistem persekolahan. Beberapa kedudukan di bentuk dan dibangun berdasarkan sistem klasifikasi sosial di antaranya adalah :

a. Kedudukan berdasarkan jenis kelamin, akan mengidentifikasi pelakunya pada perbedaan seks atau kelamin bu guru, pak guru, murid putri, siswa lelaki, pak kepala sekolah dan lain sebagainya. Secara sosial kedudukan berdasarkan seks merupakan pembedaan ruang orientasi atas dasar perbedaan fisik. Pembedaan tersebut merupakan dampak kultural dari masyarakat yang lebih luas, dimana perbedaan kelamin masih mengkisahkan pembagian kerja, hak, serta ruang gerak yang berbeda pula. Namun secara struktural pembedaan jenis kelamin tidak begitu mempengaruhi kualitas penerapan ketentuan formal sebuah lembaga. Seorang kepala sekolah wanita tetap saja memiliki otoritas atau kewenangan kekuasaan terhadap para guru lelaki maupun wakasek laki-laki.

b. Kedudukan berdasarkan struktur formal di lembaga, misalnya kepala sekolah, guru, staf administrasi, pesuruh, siswa dan lain sebagainya. Kategori kedudukan ini dilandasi oleh ketentuan- ketentuan formal yang melembagakan serangkaian peran dan pemetaan kewenangan struktural berdasarkan pembagian wilayah kekuasaan yang bersifat hierarkis. Sesuai dengan formasi struktur lembaga sekolah maka masing-masing posisi menggambarkan tingkat kekuasaan yang bertingkat-tingkat. Posisi teratas menggambarkan puncak pengakuan otoritas tertinggi lalu secara gradual makin berkurang pada posisi-posisi di bawahnya.

c. Kedudukan berdasarkan usia. Pengakuan terhadap kategori sosial ini didasarkan konstruksi sosial sekolah sebagai lembaga pendidikan. Berangkat dari pengertian tentang pengajaran sebagai sumber dari keberadaan sekolah dan segala aktivitas kelembagaannya. Sementara proses pengajaran tidak lepas dari hubungan antara pengajar dengan yang belajar. Maka bias ditangkap indikasi kecenderungan dalam lembaga sekolah untuk mengutamakan sistem nilai berdasarkan usia. Mereka yang tua dikontruksikan sebagai pengajar,

teladan, sumber nilai kebaikan, pengontrol moral, berkemampuan tinggi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pengakuan kedudukan berdasarkan usia sangat kental sekali melekat dalam orientasi warga sekolah.

d. Kedudukan berdasarkan lahan garap di sekolah. Pada dasarnya tiap-tiap status di sekolah akan membentuk wilayah-wilayah sektoral sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Dikelas jenis status yang paling dominan berperan adalah status guru dan murid. Sementara di wilayah birokrasi akan memperlihatkan kontak sosial antara pengurus administrasi baik itu kepala bagian, sekretaris, bendahara sekolah serta stafstafnya. Di tingkat pelayanan administrasi akan melibatkan pegawai administrasi dengan para siswa, guru-guru dan lain sebagainya.

2) Interaksi di Sekolah

Menurut Horton dan Hunt (1999) sistem interaksi di sekolah dapat ditinjau dengan menggunakan tiga perspektif yang berbeda, yakni:

a. Hubungan antara warga sekolah dengan masyarakat luar
b. Hubungan di internal sekolah lintas kedudukan dan peranannya.

c. Hubungan antarindividu pengemban status atau kedudukan yang sama.

Dalam kategori pertama, hubungan interaktif antara orang dalam dengan orang luar mencerminkan keberadaan sekolah sebagai bagian masyarakat. Para guru, murid dan seluruh warga di sekolah juga pengemban status-status lain di masyarakat. Sehingga interaksi di sekolah merupakan kombinasi berbagai nilai dari masyarakat yang dibawa oleh para warga sekolah. Para guru, kepala sekolah, murid-murid juga bagian dari masyarakat mereka. Mereka membawa sikap dan perilaku ke sekolah, sebagai hasil dari hubungan dengan tetangga, teman, gereja, partai politik dan berbagai ragam kelompok kepentingan.

Sementara itu secara formal, sekolah memiliki pihak-pihak yang bertanggung jawab mengadakan hubungan antara masyarakat dengan pihak sekolah. Dalam hal ini, pihak yang paling berkepentingan mengadakan hubungan dengan masyarakat adalah pengawas sekolah. Pengawas sekolah bertanggung jawab menjamin kualitas pelaksanaan pendidikan di sekolah sesuai dengan kebuuhan masyarakat. Sementara di tingkat internal pengawas sekolah juga berkewajiban memberikan perlindungan atas orientasi masyarakat sekolah dari tuntutan-tuntutan luar

yang kurang masuk akal. Sebagai pengamat atau evaluator pengawas sekolah juga memiliki tugas memelihara keharmonisan hubungan antara kelompok-kelompok yang berbeda di sekolah.

Hubungan antar status juga seringkali menimbulkan konflik antar peran.

Di dalam sekolah, tanggung jawab penjaga sekolah menyangkut kebersihan bertentangan dengan keinginan warga sekolah untuk menggunakan fasilitas sekolah semaksimal mungkin. Kebebasan profesional guru juga bertentangan dengan kepentingan pengawas sekolah dalam menciptakan kelancaran pengajaran di tiap-tiap kelas. Keinginan kepala sekolah untuk menerapkan inovasi baru harus berhadapan dengan keengganan guru dan murid untuk menerima perubahan. Salah satu konflik yang cukup krusial saat ini adalah konflik keinginan pengawas sekolah untuk mencapai hasil pengajaran yang terbaik sesuai dengan anggaran biaya yang tersedia berhadapan dengan tuntutan organisasi persatuan guru untuk memperoleh jaminan pekerjaan dan gaji yang memadai.

Namun selain menimbulkan konflik, hubungan antar status merupakan bagian dari orientasi lembaga sekolah. Secara fungsional untuk mencapai tujuan yang diharapkan sekolah

membutuhkan peran dan kiprah dari berbagai status dan kedudukan. Sehingga kerja timbal balik antarstatus diprioritaskan untuk melancarkan proses pencapaian tujuan organisasi.

Sekolah membutuhkan hubungan yang harmonis antarguru dan murid agar tujuan pengajaran di kelas dapat tercapai secara maksimal. Sekolah membutuhkan kerja sama antarberbagai pihak agar roda organisasi dapat berjalan dengan lancar.

Hubungan antarindividu atau kelompok dalam jenis status yang sama juga tidak lepas dari bagian interaksi di sekolah. Para guru selain memiliki persamaan peran sesuai statusnya juga menggambarkan berbagai perilaku guru yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan perbedaan karakter, sikap dan pengalaman individu dalam melancarkan aktivitas di sekolah. Kita ketahui bersama untuk status siswa pun juga telah terbentuk aneka ragam karakter dan perilaku individu maupun kelompok yang berbeda-beda.

3) Klik Antar Siswa

Pengelompokan atau pembentukan klik mudah terjadi di sekolah. Suatu klik terbentuk bila dua orang atau lebih menjalin persahabatan sehingga dalam keseharian telah

terikat pada kehidupan bersama baik di dalam maupun di luar sekolah. Mereka saling merasakan apa yang dialami salah satu anggota kelompoknya dan mampu mengungkap perasaan yang selama ini tersembunyi, seperti hubungan mereka dengan orang tua atau dengan jenis kelamin lain serta kesulitan pribadi-pribadi lainnya.

Keanggotaan klik bersifat sukarela dan tak formal. Seorang diterima atau ditolak atas persetujuan bersama. Walaupun klik tidak mempunyai peraturan yang jelas, namun ada nilai-nilai yang dijadikan dasar untuk menerima anggota baru. Anggota klik merasa diri bersatu dan merasa diri kuat, penuh dengan kepercayaan berkat rasa persatuan dan kekompakan. Mereka mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan individual dan sikap ini dapat menimbulkan konflik dengan orang tua, sekolah, dan klik-klik lainnya. Bila klik ini mempunyai sikap anti sosial maka klik itu dapat menjadi "geng". Orang luar, khususnya orang tua dan guru sering tidak dapat memahami makna klik bagi anggota-anggotanya. Akibatnya mereka justru makin kompak dengan kelompoknya sehingga memicu kesadaran bersama untuk sama-sama membebaskan diri dari kekuasaan dan pengawasan orang tua, sekolah dan lembaga-lembaga lainnya. Dari kelompoknya seorang

anggota yakin mendapat bantuan penuh namun sebaliknya harus mampu menunjukkan loyalitas yang tinggi pada kelompok. Mereka yang tidak patuh akan mendapat klaim sebagai pengkhianat.

Faktor yang paling penting dalam pembentukan klik adalah usia atau tingkat kelas. Suatu klik jarang beranggotakan anak yang berusia dua tahun lebih. Selain itu klik biasanya beranggotakan murid dari jenis kelamin yang sama. Tidak ada bukti yang menunjukkan pembentukan klik berdasarkan prestasi akademis atau intelegensi. Menurut pengamatan suatu klik merupakan kelompok minat atau kegemaran yang serupa, misalnya musik, olahraga dan sebagainya.

Klik juga menggambarkan struktur sosial masyarakatnya. Klik menunjukkan stratifikasi sosial yang terdapat dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Murid-murid pada umumnya memilih teman dari golongan anak yang secara sosial ekonomi memiliki kedudukan sama.

Klik-klik yang muncul di sekolah beragam wujudnya, tergantung pada perbedaan murid. Ada kemungkinan terbentuknya kelompok berdasarkan kesukuan dari kalangan siswa satu daerah atau karena mereka merupakan mioritas. Ada kelompok “elite” yang terdiri atas anak-anak

orang kaya atau menunjukkan prestasi akademis tinggi dan kepribadian tinggi. Adapula kelompok rendahan, yang berasal dari keluarga tidak berpendidikan.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas dan Efisiensi Sistem Kependidikan

Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, maka perusahaan perlu memperhatikan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas system kependidikan.

Terdapat banyak teori yang memuat tentang faktor – faktor yang mempengaruhi produktivitas system kependidikan. Oleh karena itu peneliti akan mengutip beberapa teori mengenai factor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan.

Menurut Simanjuntak dalam Sutrisno (2017:103), factor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, yaitu:

1. Pelatihan
2. Mental dan kemampuan fisik karyawan
3. Hubungan antara atasan dan bawahan

Menurut Anoraga dalam Busro (2018:346-348), faktor – faktor yang mempengaruhi produktivitas, antara lain:

1. Motivasi kerja karyawan
2. Pendidikan

3. Disiplin kerja
4. Keterampilan
5. Sikap etika kerja
6. Kemampuan kerja sama
7. Gizi dan kesehatan
8. Tingkat penghasilan
9. Lingkungan kerja dan iklim kerja
10. Kecanggihan teknologi yang digunakan
11. Faktor – faktor produksi yang memadai
12. Jaminan sosial
13. Manajemen dan kepemimpinan
14. Kesempatan berprestasi

Produktivitas yang meningkat akan memudahkan perusahaan mencapai tujuan yang inginkan. Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan dengan baik produktivitas kerja karyawan.

Untuk mengetahui produktivitas kerja karyawan meningkat atau tidak diperlukan penilaian produktivitas. Penilaian produktivitas dapat dilakukan dengan melihat beberapa indikator.

Menurut Burhanuddin Yusuf (2015) produktivitas dapat diukur melalui beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan, konsep pengetahuan lebih berorientasi pada inteligensi, daya pikir dan penguasaan ilmu. Pengetahuan merupakan akumulasi hasil proses pendidikan baik yang diperoleh secara formal maupun non – formal yang memberikan kontribusi pada seseorang didalam pemecahan masalah, termasuk dalam melakukan atau menyelesaikan pekerjaan, sehingga seorang karyawan diharapkan mampu melakukan pekerjaan secara produktif.
2. Keterampilan, yaitu kemampuan dan penguasaan teknis operasional mengenai bidang tertentu yang bersifat kekaryaan. Keterampilan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan atau menyelesaikan pekerjaan yang bersifat teknis. Dengan kemampuan yang dimiliki seorang karyawan diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan secara produktif.
3. Kemampuan, konsep ini jauh lebih luas karena dapat mencakup sejumlah kompetensi. Pengetahuan dan keterampilan termasuk faktor pembentuk kemauan.
4. Sikap, merupakan suatu kebiasaan yang dimiliki pola. Pola tersebut memiliki implikasi positif dalam hubungan dengan perilaku kerja seseorang. Perilaku manusia ditentukan oleh sikap – sikap yang telah tertanam dalam diri karyawan sehingga dapat mendukung kerja yang efektif.

Indikator produktivitas yang dikutip dalam bukunya Sedarmayanti (2011) dikembangkan dan dimodifikasi dari pemikiran yang disampaikan oleh Gilmore, Erich Fromm, tentang individu yang produktif, yaitu:

1. Tindakannya konstruktif
2. Percaya pada diri sendiri
3. Bertanggung jawab
4. Memiliki rasa cinta terhadap pekerjaan
5. Mempunyai pandangan ke depan
6. Mampu mengatasi persoalan dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah – ubah
7. Mempunyai kontribusi positif terhadap lingkungan (kreatif, imaginatif dan inovatif)
8. Memiliki kekuatan untuk mewujudkan potensinya.

BAB 7

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:
Perencanaan pembiayaan pendidikan yang ideal menurut peneliti dilakukan dengan menetapkan rencana yang menjadi prioritas, mengacu Peraturan pemerintah, perhitungannya cermat, mengoptimalkan sumber daya dan diformulasikan dengan jelas agar kelak tidak muncul pembiayaan tidak terduga. Pendistribusiannya mengakomodir kebutuhan siswa, dan memaksimalkan fungsi manajemen perencanaan. Tim perencana terdiri dari Kepala Madrasah, Waka Sarpras, Waka Humas, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaaan, satu guru senior, dan Ka TU/Bendahara Madrasah. Pengorganisasian pembiayaan pendidikan yang ideal menurut peneliti dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas sesuai keahlian tim penyusun, Waka Sarpras membidangi standar sarana dan prasarana, Waka kurikulum memegang kendali standar kompetensi lulusan dan standar penilaian, waka Humas membidangi standar pengelolaan, waka kesiswaaan membidangi standar proses, dan Ka Tu Madrasah membidangi standar pendidik dan tenaga kependidikan, Bendahara madrasah membidangi standar pembiayaan, dan salah satu guru senior membidangi standar Isi. Pembagian tersebut agar tidak tumpang tindih, dapat memprioritaskan kebutuhan, ada kerjasama tim, dan mengetahui tujuan pengorganisasian yang hendak dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Thamrin. 2012. Pembiayaan Pendidikan, Perangkat Pembelajaran di Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

Adhayani,M., & Kusumah,R. 2015.Pengaruh Efektivitasdan KontribusiPenerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak (Survei pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Tegallega, dan KPP Pratama Bandung Bojonagara).

Al Kadri, H. 2011. Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan.

Ali, M. 2009. Pendidikan untuk pembangunan nasional: menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Grasindo.

Antara, (Selasa, 8 Juli 2014) Pemprov Gorontalo Evaluasi PRODIRA, http://www. antaragorontalo.com/berita/6699/pemprov-gorontalo-evaluasi-PRODIRA

Arfan Arsyad. 2016. Influence of Knowledge of Management, Principals Attitude and Effectiveness of PRODIRA Toward school Performance in Gorontalo Provincial, Jurnal Ilmiah

Education Management Volume 7 Nomor 1 Desember 2016. Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

Arfan Aryad. 2012. Pemerintah Kabupaten Teken MoU Terkait Program Pendidikan Gratis, Gorontalo Post, Senin 13 Desember 2012. Gorontalo Arikunto, Suharsimi, (2002), Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta.

Armida, A. 2011. Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. Media Akademika, 26(1).

Dedi, Supriadi. Satuan Biaya Pendidikan. 2004 Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Dimock, ME, Dimock GO. Administrasi Negara. 1992. Jakarta: Rineka Cipta.

Domai, Tjahjanulin. 2010. Manajemen Keuangan Publik.

E. Mulyasa. Manajemen berbasis sekolah. 2004. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Engkoswara dan Komariah, Aan. (2010). Administrasi Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Fatah Syukur. Manajemen Pendidikan. 2011. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Fattah, Nanang, (2009). Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan. Cetakan ke-5. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Hoy, Wayne K., dan Miskel, Cecil G. (2013). Educational Administration. 9th Edition. New York: McGraw-Hill International Edition.

https://lpmpjogja.kemdikbud.go.id/strategi-pembelajaran-abad-21/

https://www.jogloabang.com/pendidikan/permendikbud-3-2020-standar-nasional-pendidikan-tinggi

Jamal Ma'mur Asmani. Tips Aplikasi Manajemen Sekolah. 2010. Yogyakarta: Diva Press.

KBBI Daring. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses 2021

Kementerian dan Pendidikan Nasional. 2011. Buku Panduan BOS

Ladd & Hansen. (1999). Making Money Matter: Financing America's Schools, New York: The National Academies Press.

Malang: Universitas Barawijaya Press (UB Press).

Muchdarsyah Sinungan. Dasar-dasar Management Kredit. 1993. Jakarta: Bumi Aksara.

Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah. 2007. Bandung. Remaja Rosda Karya.

Nanang Fattah. Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan. 2004. Rosdakarya. Bandung.

Nanang Fattah. Landasan Manajemen Pendidikan. 1996. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

NCREL & Metiri Group. (2003). enGauge 21st century skills: literacy in the digital age. http://www.ncrel.org/engauge/skills/skills.htm

Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Rotherham, A. J., & Willingham, D. (2009). 21st Century Skills: the challenges ahead. Educational Leadership Volume 67 Number 1 , 16– 21.

Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PROSES UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

Sulthon, M. Khusnuridlo, M. Manajemen Pondok Pesantren Dalam Perspektif Global. 2006. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Suryobroto. Manajemen Pendidikan di Sekolah. 2004. Jakarta: Rineka Cipta.

Udin Syaifudin Sa'ud dan Abin Syamsuddin Makmun. Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprensif, 2007. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Vincent P Costa. Panduan Pelatihan untuk Mengembangkan Sekolah, 2000, Jakarta: Depdiknas.

Wasty Soemanto. Pendidikan dan Wiraswasta. 1984. Malang: Bina Aksar

BIOGRAFI PENULIS

Dr. Riinawati, M.Pd, lahir di Banua Padang, 03 Mei 1986, putri dari H. Ahmad Bardi dan Hj. Juraidah (Alm) lulusan S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2017. Perempuan Asal Rantau ini adalah Dosen di UIN Antasari Banjarmasin. Beberapa Artikel yang telah ditulis antara lain di Faculty Of Education, Khon Khen University Thailand "Challenging Education For Future Change", JARDCS USA , Universitas Negeri Surabaya (UNESA), buku yang berjudul Pengantar Teori Manajemen Komunikasi dan Organisasi (2019), buku berjudul Manajemen Perubahan Menuju Perguruan Tinggi Modern (2018) dan lain-lain.

MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN

Semenjak diberlakukannya 8 Standart Nasional Pendidikan yang meliputi, standar pengelolaan, standar isi, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar pembiayaan, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian, yang diberlakukan pemerintah, maka setiap sekolah atau madrasah harus berbenah memenuhi delapan standar tersebut, agar dapat eksis dan diakui keberadaannya.

Manusia pada umumnya adalah mengatur (managing) untuk mengatur disini diperlukan suatu seni, bagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam kontek permasalahannya, pembiayaan pendidikan memang sangat mahal dengan asumsi jika diinginkan sebuah madrasah yang berkualitas maka harus didukung dengan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan profesionalisme, dana operasional yang cukup dan kenyamanan bagi kegiatan pembelajaran peserta didik dan fasilitas yang lengkap, hal ini akan terwujud apabila ditunjang dengan anggaran yang memadai, sehingga dapat menopang proses pembelajaran yang maksimal dengan harapan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Buku referensi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Buku ini juga bertujuan untuk memberi sedikit pencerahan bagi pembaca dan pemerhati penelitian pendidikan.



Dr. Riinawati, M.Pd, lahir di Banua Padang, 03 Mei 1986, putri dari H. Ahmad Bardi dan Hj. Juraidah (Alm) lulusan S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2017. Perempuan Asal Rantau ini adalah Dosen di UIN Antasari Banjarmasin. Beberapa Artikel yang telah ditulis antara lain di Faculty Of Education, Khon Khen University Thailand "Challenging Education For Future Change", JARDCS USA , Universitas Negeri Surabaya (UNESA), buku yang berjudul Pengantar Teori Manajemen Komunikasi dan Organisasi (2019), buku berjudul Manajemen Perubahan Menuju Perguruan Tinggi Modern (2018) dan lain-lain.

PUBLISHER
CV. EL PUBLISHER
Jl. Jahri Saleh No. 50 Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.
E-Mail: elpublisher86@gmail.com
Laman: www.elpublisher.com
Narahubung: 085377799989

ISBN 978-623-99159-7-1
9 786239 915971

3. Buku Referensi 2022 - Manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.pdf

ORIGINALITY REPORT

19%	20%	6%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%

★ epdf.tips

Internet Source

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	On		